SINTESA

INDIKATOR

Interseksi Uang dan Politik



Kata Pengantar

"Man is by nature a political animal."
–Aristoteles

Kutipan dari Aristoteles tersebut menyiratkan bahwa segala gagasan, perilaku, dan tindakan manusia selalu mengandung nilai-nilai politis. Jika kita merujuk pada pendapat Harold Laswell, politik adalah perkara mengenai siapa mendapatkan apa lalu kapan dan dengan cara yang seperti apa. Secara alamiahnya, manusia pasti akan berusaha memperoleh segala hal yang dapat membantunya untuk bertahan hidup, apapun bentuknya. Salah satunya adalah uang. Tidak dapat dipungkiri bahwa di abad ke-21 ini, hampir segala aspek kehidupan manusia ditopang oleh uang. Di saat yang bersamaan, tidak dapat dipungkiri pula bahwa kondisi yang begitu kompetitif di abad ini mampu mendorong manusia untuk melakukan berbagai cara untuk memperoleh uang, termasuk cara yang 'kotor.' Tidak sedikit mereka yang memiliki kekuasaan, justru memanfaat kekuasaan yang mereka miliki untuk memperoleh uang yang berlebihan di luar kebutuhan dasarnya hingga meraup uang yang sejatinya merupakan hak orang lain.

Sesuai dengan tema 'Interseksi Uang dan Politik,' majalah Indikator tahun 2021 ini mengupas berbagai ruang dan aspek yang memungkinkan adanya pertemuan uang dan politik. Rubrik-rubrik dalam majalah ini mendalami dan menganalisis bagaimana pertemuan antara uang dan politik berpengaruh terhadap dinamika kehidupan sosial dan bayangan masa depan dari fenomena ini. Tema ini menarik untuk dibahas karena isu uang dan politik sudah sejak lama melekat dalam kehidupan manusia. Tema ini menjadi semakin relevan dengan kondisi pandemi saat ini di mana kondisi ekonomi dunia, termasuk Indonesia, mengalami penurunan yang cukup drastis sehingga memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia.

Akhir kata, semoga pembahasan yang disajikan majalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam bentuk apapun. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam majalah ini. Selamat membaca!

Penanggungjawab: Tara Reysa Ayu Pasya & Jessenia Destarini Asmoro

Tata Letak: Dhea Ramadhani & Narinda Marsha Paramastuti

Kontributor: Adinda Safiratul Afifah, Aldi Haydar Mulia, Alma Delia Sukma, Arum Sekar Pertiwi, Cheryl Kanza Athallia Wibowo, Christina Vania Winona, Gantar Eliezer Sinaga, Ishlah Abidin Atmaja, Langit Gemintang Muhammad Hartono, Muhammad Daffa Arnanda, Najwa Ahila, Ni Made Diah Apsari Dewi, Ramadhani Sulistyorini, Refina Anjani Puspita, Salsabila Yusri Afiya, Sayyid Al Murtadho, Sekarini Wukirasih, Sulistyorini Wahyu Lestari, Sherlly Rossa

Penyunting: Aprilia Handriyastuti, Fariz Azhami Ahmad, Ishlah Abidin Atmaja, Langit Gemintang Muhammad Hartono, Marsa Ikhtira Utami, Masako Septianingrum Ompusunggu, Najzeela Tayyima Elhikma, Sarah Fadila Dinestiningtyas, Sayyid Al Murtadho, Tara Reysa Ayu Pasya, Tia Intan Nurlaeli

SINTESA
LEMBAGA PERS DAN PENERBITAN MAHASISWA FISIPOL UGM

Daftar Isi

Danais Untuk Siapa?
Interseksi Uang dan Feodalisme

Penulis: Sayyid Al Murtadho & Rahmadhani Sulistyorini
Penyunting: Tara Reysa Ayu Pasya



Seiring meningkatnya kasus Covid-19 akibat varian Delta pada pertengahan Juni, pemerintah merespons dengan berbagai kebijakan, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta yang turut mengalami kenaikan kasus secara signifikan. Pada 18 Juni 2021, Sultan Hamengkubuwono X melontarkan pernyataan bahwa *lockdown* adalah solusi terakhir bila PPKM Mikro yang telah dijalankan gagal untuk membatasi mobilitas masyarakat (CNN Indonesia, 2021). Hanya beberapa hari berselang, Sultan meralat ucapannya--menyebut bahwa ia tidak kuat untuk *ngragati* (membiayai) rakyat selama masa *lockdown* (CNN Indonesia, 2021). Sultan menekankan pentingnya Satuan Tugas (satgas) di tingkat RT dan meminta masyarakat bergotong royong menghimpun dana untuk operasional satgas, termasuk menggunakan dana jimpitan (Hasanudin, 2021). Hal ini menimbulkan kritik yang luas di media sosial, terutama di platform Twitter. Bahkan, terdapat sebagian pengguna yanv memplesetkan akronim DIY menjadi *Do It Yourself*.

Salah satu yang disorot oleh warganet terkait pernyataan Sultan tersebut adalah fakta bahwa DIY, berbeda dengan provinsi lainnya, memiliki Dana Keistimewaan atau Danais yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya. Masyarakat berharap dengan adanya dana tambahan ini, seharusnya Pemda DIY mampu memberikan berbagai kebutuhan masyarakat yang tidak tercukupi akibat pandemi Covid-19. Meski begitu, pada Maret 2020, Sultan sebenarnya sempat menjelaskan bahwa berbeda dengan APBD, Danais tidak bisa digunakan untuk menangani dampak pandemi Covid-19 disebabkan kerumitan prosedur birokrasi yang mengatur Danais (Mustaqim, 2020). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Danais merupakan anggaran khusus sebagai bentuk konsekuensi "status istimewa" DIY sehingga hanya dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan keistimewaan DIY. Penyelenggaraan keistimewaan yang dimaksud diantaranya adalah tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan; kebudayaan; pertanahan; serta tata ruang. Lebih lanjut, setiap tata cara pengalokasian dan penyaluran Danais diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dengan begitu, apabila dibutuhkan realokasi Danais di luar penyelenggaraan keistimewaan, seperti penanganan dampak pandemi COVID-19, diperlukan persetujuan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Alasan regulasi yang melingkupi tata alokasi Danais agaknya tidak dapat menyurutkan kekesalan masyarakat. Sebabnya, Kementerian Keuangan telah mengizinkan penggunaan Danais untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 melalui PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Surat Keputusan S-121/PK/2021 tentang Penggunaan Dana Keistimewaan untuk Penanggulangan COVID-19. Akan tetapi, pemerintah DIY malah menggunakan dana tersebut untuk hal-hal yang kurang krusial. Pada tahun 2020 dan 2021, pemerintah DIY memperoleh Danais masing-masing sebesar Rp1,32 triliun. Tahun lalu, pemerintah DIY menghabiskan Rp2,8 miliar untuk membangun pagar di Alun-Alun Utara, Rp4,8 miliar untuk perbaikan tembok benteng Kraton, Rp170 miliar untuk pembelian gedung Hotel Mutiara I dan II, dan Rp9,5 miliar untuk memoles Tugu Jogja (Wijana dan Jiwandono, 2021). Kekesalan warganet semakin bertambah akibat cuitan dari seorang Putri Kraton, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono. Merespons cuitan UGM Today yang membahas mengenai pembiayaan swadaya Satgas RT, ia membalas kritik warganet dengan mengungkit bagaimana pemerintah telah memberikan berbagai bantuan sosial dan vaksinasi. Lebih lanjut, GKR Condrokirono juga membela program pagar Alun-Alun Utara yang disebutnya sebagai bagian untuk menjaga supaya pekarangan Raja tidak kumuh. Padahal, Sultan tahun lalu menyebut bahwa pagar tersebut didirikan untuk mengembalikan kondisi seperti tempo dulu.

Cuitan GKR Condrokirono mencerminkan bagaimana Danais rentan untuk digunakan untuk kepentingan Keraton. Urusan kebudayaan, pertanahan, dan sebagainya yang diatur oleh UU hanya menjadi alasan untuk memuluskan

keinginan Keraton. Persoalan pagar Alun-Alun Utara tersebut, misalnya, dibingkai sebagai urusan kebudayaan. Akan tetapi, terdapat pula kepentingan estetika tersendiri yang diinginkan oleh Keraton, mengacu pada cuitan GKR Condrokirono. Dalam bidang pertanahan, inventarisasi Sultan Ground atau tanah yang dimiliki Sultan didanai oleh Danais. Padahal, Sultan Ground dikritik oleh berbagai pihak, seperti Komnas HAM, yang menyebut bahwa Sultan Ground bertentangan dengan UU Agraria (Tempo, 2016). Selain itu, fokus kebudayaan masih terbatas pada kegiatan kesenian dan tradisi, sedangkan maknanya sebenarnya luas, seperti kritik dari Dwi Wahyu, anggota DPRD DIY (Warta Jogja, 2021). Hal ini diperparah pula oleh lemahnya pengawasan terhadap Danais. DPRD DIY, misalnya, tidak terlibat dalam perencanaan alokasi Danais. Akibatnya, DPRD DIY tidak tahu menahu mengenai pembelian Hotel Mutiara I dan II yang akhirnya disorot oleh BPK (Susanto, 2021).

Berbagai polemik seputar Danais tersebut sebenarnya bermuara pada satu kritik besar, yaitu tidak meningkatnya kesejahteraan rakyat DIY. Penelitian Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI (2020) menggarisbawahi bagaimana angka kemiskinan DIY menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa, bahkan melebihi angka kemiskinan nasional, dengan ketimpangan yang juga tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Danais belum mampu mencapai tujuannya, yaitu mendukung Keistimewaan DIY demi mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat sesuai ketentuan UU No. 13 tahun 2012. Sebagai seorang pemimpin yang masih dipercaya oleh mayoritas rakyat Jogja, Sultan seharusnya mencontoh teladan Sultan Hamengkubuwono IX yang selalu mengutamakan rakyatnya, termasuk dengan membangun Selokan Mataram untuk melindungi rakyat Jogja dari kewajiban romusha. Oleh karena itu, Sultan harus memiliki *sense of crisis* untuk melakukan berbagai upaya, termasuk mengalokasikan Danais secara cepat untuk penanganan Covid-19 dan menjamin kehidupan masyarakat DIY.

Referensi

CNN Indonesia. (2021). Sultan Tarik Ucapan Lockdown: Saya Enggak Kuat 'Ngragati'. Retrieved 19 July 2021, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210621182306-20-657407/sultan-tarik-ucapan-lockdown-saya-enggak-kuat-ngragati

Hasanudin, U. (2021). Sultan: Biaya Penanganan Covid-19 Tingkat RT Bisa Pakai Dana Jimpitan - Harianjogja.com. Retrieved 19 July 2021, from https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/07/02/510/1075969/sultan-biaya-penanganan-covid-19-tingkat-rt-bisa-pakai-dana-jimpitan

PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BADAN KEAHLIAN DPR RI. (2020). AKUNTABILITAS DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY). Jakarta: PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA. Retrieved from https://berkas.dpr.go.id/puskajiakn/kajian-akuntabilitas/public-file/kajian-akuntabilitas-public-7.pdf

Susanto, H. (2021). BPK Soroti Pembelian Hotel Mutiara Malioboro dari Danais, DPRD DIY: Petaka!. Retrieved 19 July 2021, from https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5542167/bpk-soroti-pembelian-hotel-mutiara-malioboro-dari-danais-dprd-diy-petaka

Tempo. (2016). Komnas HAM: Keraton Yogya Kembalikan Prinsip Raja Kuasai Tanah. Retrieved 19 July 2021, from https://nasional.tempo.co/read/778818/komnas-ham-keraton-yogya-kembalikan-prinsip-raja-kuasai-tanah

Warta Jogja. (2021). Di Tengah Covid-19 Yogya Kian Tinggi, DPRD DIY Ramai-Ramai Soroti Manfaat Danais Rp 1,3 T. Retrieved 19 July 2021, from https://www.wartajogja.id/2021/01/di-tengah-covid-19-yogya-kian-tinggi.html

Wijana, E., & Jiwandono, R. (2021). Penggunaan Dana Keistimewaan DIY Disorot, Aktivis JCW Singgung Pagar Alun-Alun Utara. Retrieved 19 July 2021, from https://jogja.suara.com/read/2021/07/08/212341/penggunaan-dana-keistimewaan-diy-disorot-aktivvis-jcw-singgung-pagar-alun-alun-utara?page=all

Mustaqim, A. (2020, April 9). Dana Keistimewaan Yogyakarta Tidak Bisa Digunakan Untuk Penangan Covid-19. Retrieved from Medcom.id: https://www.medcom.id/nasional/daerah/ObzMAR9N-dana-keistimewaan-yogyakarta-tidak-bisa-digunakan-untuk-penanganan-covid-19

Antara Uang dan Rakyat: Retorika Tambang dalam Pusaran Politik

Penulis: Ishlah Abidin Atmaja & Muhammad Daffa Arnanda

Penyunting: Fariz Azhami Ahmad

Tambang setidaknya menjadi komoditas yang sangat menggiurkan karena besarnya keuntungan yang mungkin dapat diperoleh. Tetapi, ternyata sektor ekstraktif ini juga menyimpan kelabu yang ternyata berdampak sangat besar pada kehidupan sebagian masyarakat. Setidaknya, itulah yang dialami oleh masyarakat Halmahera Timur, tak terkecuali masyarakat Desa Baturaja yang terus berhadapan dengan masalah yang diakibatkan oleh perusahaan tambang PT Alam Raya Abadi hingga sekarang. Perusahaan tambang ini mulai mengeruk tanah di Kecamatan Wasile sejak tahun 2010. Bahkan, tidak hanya PT ARA saja yang mengeruk tambang di tanah Halmahera Timur, setidaknya terdapat 17 perusahaan tambang yang masih terus beroperasi hingga saat ini. Dampak negatif yang dirasakan masyarakat di antaranya: tidak adanya jalan khusus pertambangan, sehingga membuat jalanan utama masyarakat menjadi rusak; pencemaran yang ditimbulkan oleh pabrik; lahan-lahan milik warga yang hilang; dan lain-lain. Lalu, sebenarnya bagaimana liku panjang antara masyarakat dengan setiap stakeholders pertambangan yang terlibat? Bagaimana seharusnya mereka mengelola perusahaan tambang untuk keberlangsungan bersama dan tentunya meredam amarah masyarakat?

Dikutip dari Hiar (2021) bahwa menelisik perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Halmahera Timur, apabila ditinjau dari kelingkungannya, terdapat daerah-daerah yang tidak pantas dijadikan daerah pertambangan karena keadaan lingkungan sekitar perusahaan yang sebenarnya justru sangat tidak mendukung untuk adanya perusahaan tambang di wilayah tersebut, seperti terlalu dekat dengan sumber perairan utama masyarakat, dekat dengan daerah endapan, dan lain-lainnya, tetapi justru tempat tersebut mendapatkan izin penuh untuk berdirinya perusahaan tambang, bahkan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar perusahaan tersebut beroperasi. Setidaknya, dampak negatif yang harus dirasakan oleh masyarakat adalah tercemarnya sumber perairan masyarakat, rusaknya jalan-jalan utama karena tidak adanya jalur khusus tambang, dan nelayan sungai yang sengkarut akan banyaknya ikan sungai yang mati diakibatkan banjir lumpur sebagai dampak dari operasi perusahaan tambang, dll (Taib, 2020; Ichi, 2020; Hidayat, 2021). Bahkan, PT Antam yang beroperasi di Blok Manoropo, sangat mengherankan mampu mendapat izin AMDAL hingga izin lingkungan untuk mendirikan usaha, menilik keadaan kenyataan di lapangan bahwa kolam endap (sediment pond)--yaitu kolam yang berfungsi untuk mengendapkan bahan-bahan buangan tambang--yang sangat terbatas jumlahnya (Hiar, 2021). Pun hal ini masih diperparah dengan check dam--yang berfungsi mengendalikan aliran air yang membawa endapan--di perairan dekat perusahaan tersebut yang beroperasi tidak sesuai dengan spesifikasi, yang harusnya sangat jeli dalam memperhitungkan perhitungan debit dari desain rencana, perencanaan luapan aliran, perencanaan main dam (bendungan utama), perencanaan pondasi, dll (Prasetiyo et al, 2014; Rahayu et al, 2017). Ketidak hati-hatian tersebut, tentunya mampu membawa dampak negatif pada jangka panjangnya, seperti yang sudah terjadi saat ini salah satunya adalah banyaknya ikan yang mati akibat endapan material yang tidak ditangani dengan benar.

Saat perusahaan-perusahaan tambang di Halmahera Timur berdiri, berlaku UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang sangat mempermudah pengadaan izin usaha tambang melalui pemerintah daerah. Terlebih dalam kasus ini, seperti yang tercantum dalam Pasal 37 dalam UU No. 4 Tahun 2009 tersebut, bahwa Izin Usaha Tambang (IUP) dapat diberikan oleh kepala daerah, yaitu bupati/walikota, apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; dan diberikan oleh gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih-dengan adanya sistem politik desentralisasi di Indonesia-seakan semakin mempermudah berdirinya perusahaan-perusahaan tambang di Halmahera Timur ini,

karena pemerintah daerah dapat dengan mudahnya melimpahkan perizinan usaha pertambangan, bahkan hingga sampai pada tahapan di mana campur tangan pemerintah tidak diperlukan sama sekali.

Tak hanya berhenti sampai di situ, ternyata kemudahan pengadaan perusahaan tambang yang tidak memenuhi ketentuan izin AMDAL tersebut masih diperparah dengan adanya bupati-bupati korup yang dengan begitu mudahnya memberikan izin usaha kepada beberapa perusahaan di Halmahera Timur. Belum lagi, ternyata deretan nama-nama direksi dan komisaris dari perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Halmahera Timur banyak berasal dari golongan-golongan politisi tertentu dan bahkan terdapat nama-nama yang cenderung "bermasalah", karena diantara nama-nama individu yang menjadi komisaris di perusahaan-perusahaan tambang tersebut, terdapat nama-nama individu yang pernah tercatut dalam kasus korupsi. Hal tersebut memperkuat adanya fakta bahwa para kepala daerah dan politikus yang meraup untung begitu besar dari pengadaan izin usaha tambang ini (Prabowo, 2021).

Dalam perkembangannya, UU Nomor 4 Tahun 2009 kemudian direvisi menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020, dengan dasar bahwa terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki pada sektor tambang agar mampu memberikan kontribusi positif yang nyata kepada masyarakat, yang tentunya berlandaskan atas asas manfaat, wawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, dan akuntabilitas, seperti yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 (Pujianti, 2020). Tetapi kenyataannya-dalam hal ini adalah apa yang dialami oleh masyarakat Halmahera Timur-UU Minerba yang baru, tak ayalnya hanyalah semakin menguntungkan mereka yang sudah berada di atas, bukan rakyat secara umum. Dilansir dari (Prabowo, 2021), Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) pernah menyoroti salah satu pasal hasil revisi UU Minerba yang disinyalir akan memperparah nasib warga di sekitar lokasi tambang. Pasal yang disoroti dalam hal ini adalah Pasal 172B UU No. 3 Tahun 2020, yang berbunyi "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus), atau WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) yang telah diberikan izinnya". Pasal tersebut seakan mengindikasikan bahwa pemerintah memberikan jaminan penuh pada sebuah wilayah pertambangan, sehingga mengakibatkan akan tetap berlakunya/berjalannya operasional perusahaan dalam keadaan apapun, yang berarti keluhan akan kerugian dan kerusakan yang dialami masyarakat akan menjadi tidak cukup kuat untuk menghadang operasi perusahaan tambang. Hal ini tentunya melegitimasi para penguasa tambang untuk tetap mengeruk keuntungan lewat eksploitasi tambang.

Hal lain yang perlu disorot dalam kasus ini adalah pemberian ganti rugi dari pihak perusahaan yang dinilai masyarakat terdampak tidak sepadan dengan berbagai kerusakan yang ditimbulkan. Pada tahun lalu, limbah yang dihasilkan dari proses pertambangan milik perusahaan PT. ARA membanjiri ladang, sawah, tambak ikan, bahkan hingga memasuki wilayah pemukiman warga (Prabowo, 2021). Hal ini tentu saja memberikan kerugian yang sangat besar bagi penduduk sekitar terutama bagi mereka yang memilih menjadi petani sebagai mata pencahariannya. Memang, PT. ARA telah memberikan uang senilai 250 juta rupiah kepada desa yang terdampak, namun nominal ini dinilai warga sebagai nominal yang tidak sepadan dengan kerugian yang mereka alami. Robi, salah seorang warga setempat menilai seharusnya PT. ARA memberikan Rp 1 miliar yang dinilainya baru sepadan dengan kerugian yang mereka alami (Prabowo, 2021).

Pemerintah sebagai pembuat undang-undang harus senantiasa mempertimbangkan dengan matang segala keputusan yang akan diambil, khususnya terkait dengan permudahan izin tambang. Jangan sampai permudahan izin tambang harus mengorbankan nurani pemerintah untuk kepentingan borjuis dalam mengejar kepentingannya serta melupakan hak yang seharusnya didapatkan oleh tiap rakyat hingga lapisan paling bawah. Hak-hak tersebut tak lain adalah yang sudah terampas hingga saat ini, seperti hak dalam mata pencaharian yaitu nelayan yang terganggu karena banyak ikan yang mati akibat adanya endapan tambang di sungai; hak akan adanya air bersih; jalanan masyarakat yang dirusak karena perusahaan tambang yang tidak membangun jalur khusus pertambangan; dl. Meninjau dan melihat ulang segala kebijakan yang ada saat ini, menjadi hal lain yang harus diperhatikan pemerintahan, sebab dampaknya yang tidak hanya terkait pada pertambangan, namun juga terkait dengan kebijakan pemerintah lebih lanjut. Upaya pemantauan dan pengawalan ketat sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap bisnis pertambangan sebagai salah satu sektor bisnis penghasil rupiah terbesar di negeri ini. Hal ini sangat perlu agar masyarakat tidak terus menerus ditindas oleh taipan tambang penggerus kesejahteraan rakyat.

REFERENSI

Hiar, Hairil. (2021). Antam Diminta Tutup Aktivitas Tambang di Blok Manoropo Halmahera Timur. Diakses dari https://kieraha.com/maluku-utara/halmahera/45329/antam-diminta-tutup-aktivitas-tambang-di-blok-manoropo-halmahera-timur/, pada 26 Juli 2021.

Prabowo, Haris. (2020). Halmahera dalam Cengkeraman Taipan Tambang Nikel & Pejabat Korup. Diakses dari https://tirto.id/halmahera-dalam-cengkeraman-taipan-tambang-nikel-pejabat-korup-ghDB, pada 26 Juli 2021.

Prasetiyo, R. A., Amali, A., Wahyuni, S. E., & Kodoatie, R. J. (2014). Perencanaan Bangunan Pengendali Sedimen, Zona Non Cekungan Air Tanah, Hulu Sungai Serang, Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Jurnal Karya Teknik Sipil, 3(2), 447-449.

Pujianti, Sri. (2020). Pemerintah: Perubahan UU Minerba Dilakukan Guna Memperbaiki Kontribusi Sektor Pertambangan. Diakses dari https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16679&menu=2, pada 28 Agustus 2021.

Rahayu, T., Suyanto, S., & Solichin, S. (2017). Evaluasi fungsi bangunan pengendali sedimen (check dam) pengkol berdasarkan perubahan tata guna lahan kali keduang kabupaten Wonogiri. Matriks Teknik Sipil, 5(1).

Taib, Z. (2020). DAMPAK EKPLOTASI TAMBANG EMAS PT NUSA HALMAHERA MINERALS TEHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT. Agroprimatech, 4(1), 6-7.

Hidayat, Rian Husni. Deras Kerukan Tambang dan Nasib Sungai Waleh di Halmahera Tengah. Diakses dari https://fwi.or.id/tambang-dan-sungai-waleh-halmahera-tengah/, pada 19 Agustus 2021.

Ichi, Mahmud. Banjir Lumpur dan Ikan Mati di Halmahera, Dampak Operasi Tambang Emas?. Diakses dari https://www.mongabay.co.id/2020/05/07/banjir-lumpur-dan-ikan-mati-di-halmahera-dampak-operasi-tambang-emas/, pada 13 Agustus 2021.

Parade Sirkus

Sherly Rossa

Parade sirkus meriah tahun kabisat
Pengulangan empat
Pada sirkus sunyi yang berlaga
Pertanda tiga
Pandangan buta gelap gulita
Pencalonan dua
Pada retorika yang tak kunjung jua

Akar rumput berteguh satu,

Atensi adalah nol, nol, nol
Angka adalah represi repetitif
Atensi palsumu pun dibanderol dengan
Angka yang kian agresif
Anak kami mati bukan karena alkohol, tapi
Atas anugerah Sang Hyang Tarif

Lalu mereka berkelakar
Lautan manusia ini hanyalah angka
Luka mereka hanyalah sangkar
Luput tanpa sempat menyangka
Lalu tuan dan puan hadirkan parade untuk kami
Laksana pemberani, bagi penghuni
Lelucon konspirasi negeri ini

Sederet bintang dihadirkan
Silih berganti berguguran
Sederet gerobak serba putih ditarik
Sirinenya nyaring memekik
Semuanya sibuk berakrobat
Sampai lupa apa itu kodrat
Sungguh,
Sirkus mana lagi yang akan ditampilkan?

Urip iku urup, katanya
Untaian makna kita
Usang bersulang cahaya pelita

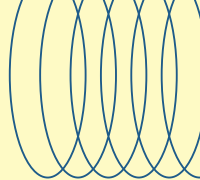
Untuk tuan dan puan
Untuk bujang dan perawan
Ulurkan waktu kita sejenak
Usai kita saling berteriak
Usai kita saling menjambak
Ujarkan salam perdamaian, sampai
Udara persatuan menguap mengudara

Untukmu, aku, dan kita
Undanglah kami ke parade sirkus yang sesungguhnya

-Banyuurip, awal bulan kemerdekaan 2021

Penyunting: Aprilia Handriyastuti

GURAT



Membongkar Gelapnya Permainan Politik Jelang Pemilu

Penulis: Sulistyorini Wahyu Lestari | **Penyunting:** Marsa Ikhtira Utami

Dunia politik realitanya tidak menggambarkan dambaan ekspektasi jutaan manusia, bahwa politik berjalan diatas putih tanpa noda hitam. Saling jegal dan melegalkan segala cara pun bukan hal yang baru dalam kisah politik manapun. Woo Jang-Hoon, mantan anggota kepolisian yang beralih tugas menjadi Jaksa Agung Pengadilan Tinggi Seoul muncul sebagai pembuktian bahwa dunia politik memang penuh intrik yang licik. Woo Jang-Hoon merupakan mantan polisi yang kini bekerja menjadi jaksa di Pengadilan Kota Seoul. Ia bukanlah seorang jaksa yang berasal dari kalangan terpandang atau memiliki reputasi yang tinggi. Hadir sebagai jaksa tanpa relasi yang kuat membuatnya memutar otak untuk menaikkan namanya sebagai jaksa sekaligus agenda menegakkan keadilan dalam jagat politik Korea Selatan. Skandal korupsi menjelang pemilihan presiden menjadi jalannya untuk bertemu dengan Ahn Sang-Goo.



Ahn Sang-Goo, si gangster yang kerap menjadi kaki tangan oknum-oknum penting baru saja dikhianati oleh Lee Kang-Hee, jurnalis senior yang memiliki hubungan timbal balik dengan dirinya. Tidak hanya dikhianati oleh orang yang dianggapnya sebagai saudara, Ahn Sang-Goo juga disingkirkan oleh mitranya sendiri, Jang Pil-Woo dan Presiden Oh, yang menjadi dalang dari kasus korupsi antara sponsor kampanye, Mirae Motor dan anggota kongres Jang. Momen ini menjadi kesempatan emas bagi Woo Jang-Hoon untuk membuktikan kemampuannya sebagai jaksa walau tanpa relasi kuat. Bermula dari keadaan ini, Ahn Sang-Goo kemudian bekerja sama dengan Woo Jang-Hoon dalam misi pembalasan dendam terhadap oknum yang menyingkirkan dirinya.

Woo Jang-Hoon lain di sekitar kita.

Sejatinya sosok Woo Jang-Hoon ini tidak begitu asing. Ada banyak Woo Jang-Hoon 'lainnya' di dunia nyata yang sama-sama berasal dari keluarga pinggiran, hanya dengan bermodalkan nekat dan tekad mereka berusaha menembus jajaran atas penegak hukum yang memerlukan 'orang dalam'. Woo Jang-Hoon adalah gambaran nyata dari golongan tanpa privilege dan cita-cita menuju kesuksesan. Pada awalnya tokoh Woo Jang-Hoon digambarkan sebagai seseorang dengan niat mulia, ingin menegakan keadilan di tengah kotornya permainan politik. Namun, seiring berjalannya film ini, penggambaran tersebut menyoroti bahwa tujuan lain Woo Jang-Hoon adalah mendongkrak kredibilitas dirinya sebagai jaksa baru dengan menyelesaikan kasus korupsi antara Mirae Motor dan anggota kongres Jang. Ibarat peribahasa sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, itulah yang ditunjukkan sosok Woo Jang-Hoon.

Balas dendam. Pembuktian. Keadilan.

Tiga kata itu cukup menggambarkan bagaimana suasana film Inside Men yang merupakan adaptasi dari webtoon dengan judul Naeboojadeul. Mungkin terdengar seperti alur cerita yang sering diambil oleh beragam film kriminal pada umumnya, tapi setidaknya film Inside Men ini mengajak kita menebak bagaimana ujung dari skandal korupsi panas jelang pemilihan presiden. Selama 130 menit film ini menyajikan intrik dan gelapnya dunia politik yang sebenarnya. Beberapa adegan dirasa mampu membuat penonton menahan nafas akibat adegan kekerasan yang ditampilkan. Selain itu, Inside Men juga memberikan penampilan dari sederet aktor kenamaan industri film Korea Selatan. Chemistry antara dua pihak yang bersekongkol, dimainkan dengan apik oleh Lee Byung-Hun (Ahn Sang Goo) dan Cho Seung-Woo (Woo Jang Hoon). Sayangnya, pada beberapa bagian film ini ada alur cerita yang cenderung dipercepat dan tidak tergambar secara jelas sehingga hanya menjadi bagian yang samar-samar dan cenderung memberi tanda tanya bagi penonton.

Identitas Film (dilansir dari asianwiki.com)

Judul : Inside Men
Sutradara : Woo Min-Ho
Penulis Cerita : Yoo Tae-Ho (komik), Woo Min-Ho
Genre : Kejahatan, kriminal, menegangkan
Tanggal Rilis : 19 November 2015
Negara Asal : Korea Selatan
Pemeran :
Lee Byung Hun, Cho Seung-Woo, Baek Yoon-Sik, Lee Kyoung-Young, Kim Hong-Fa, Jo Jae-Yun, Bae Sung-Woo, Kim Dae-Myung, Jo Woo-Jin

Minta Maaf

Penulis: Langit Gemintang Muhammad Hartono & Aldi Haydar Mulia
Penyunting: Sayyid Al Murtadho

Belum lama ini, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, meminta maaf kepada publik atas kebijakan pelonggaran pembatasan mobilitas warga yang berakibat pada kembali melonjaknya kasus harian Covid-19 di Belanda. Hal ini memberi kesan yang lebih baik jika dibandingkan dengan sesi konferensi pers sebelumnya, di mana ia dan Menteri Kesehatan Belanda, Hugo de Jonge, enggan mengakui kesalahan tersebut dengan alasan bahwa kondisi saat itu dianggap memungkinkan bagi pemerintah untuk melakukan pelonggaran.

Bagi pemimpin--terutama pemimpin suatu negara--meminta maaf dapat diterjemahkan sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Mereka juga toh merupakan "karyawan" yang mengabdi pada rakyat--setidaknya di negara-negara demokratis. Ketika ada kesalahan tugas mereka untuk mengurusi negara, seperti kasus di atas, permintaan maaf setidaknya dapat melahirkan asumsi bahwa mereka memiliki rasa tanggung jawab kepada publik. Bahkan, tidak jarang pemimpin/pejabat mengundurkan diri akibat kesalahan fatal yang mereka perbuat.

Bagaimana dengan Indonesia? Jarang sekali kita melihat pemimpin benar-benar meminta maaf di muka umum. Tidak seperti selebritas yang tengah terseret dalam kasus atau konflik, politisi-politisi di negeri ini nampaknya nyaman-nyaman saja ketika perbuatannya tidak sreg dipandang publik, bahkan setelah diringkus aparat karena kasus korupsi. Tampang mereka yang terekspos kamera dalam balutan rompi oranye khas KPK itu tidak sekali pun menunjukkan rasa penyesalan. Jangankan meminta maaf, mereka justru tersenyum ketika diarak aparat menuju mobil. Apa karena sudah tahu bakal dapat penjara eksklusif?

Dalam merespons kritik dan krisis, tingkah laku pejabat juga tidak kalah mengherankan. Umpamanya pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan bahwa melonjaknya kasus harian Covid-19 di Indonesia masih "terkendali". Sangat terkendali bagi negara dengan kasus harian baru di angka 56.757 pada 15 Juli kemarin. Mengikut konsep yang dikenalkan oleh William Lutz, yaitu Doublespeak, pernyataan Luhut ini merupakan upaya menutup-nutupi kenyataan dengan majas eufemisme. Diksi "terkendali" tentu tidak sesuai dengan kondisi institusi kesehatan Indonesia yang pontang-panting menghadapi lonjakan kasus, tetapi tetap saja digunakan dalam pernyataan tersebut.

Padahal, dalam penanganan krisis, terutama pada waktu pandemi ini, permintaaan maaf resmi dari pemerintah penting sebagai mekanisme komunikasi publik ketika masyarakat mulai memperlihatkan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap otoritas. Permintaan maaf resmi adalah suatu cara pemerintah untuk menunjukkan kewibawaannya yang telah terkikis karena kegagalan mereka. Sikap acuh dengan menutupi segala kegagalan pemerintah dalam mengatasi pandemi hanya akan menciptakan citra pemerintah yang menutup mata dan abai terhadap kritik. Hal ini akhirnya menciptakan wajah pemerintahan yang terlihat semakin kehilangan kewibawaan di mata publik.

Apa akibat dari kehilangan wibawa tersebut? Kehilangan wibawa pada pemerintah hanya akan menciptakan publik yang tak percaya dan suportif terhadap kerja mereka. Pemerintah terkesan hanya bergerak sendiri tanpa mau menempatkan publik sebagai pengawal dan sosok yang berperan aktif dalam suatu implementasi kebijakan. Sementara itu, situasi semakin memburuk tanpa ada perubahan yang berarti dari suatu kebijakan. Akibatnya, publik hanya akan terus bersikap sinis dan melanggar peraturan karena ketiadaan kepastian dari kebijakan pemerintah. Sementara itu, sindiran-sindiran dalam berbagai macam bentuk kritik mulai dari demonstrasi atau postingan media sosial hanya akan terus berseliweran dan mengundang semakin banyak kekecewaan masyarakat. Sementara, masyarakat yang termarjinalkan karena PPKM -- terutama para pedagang kecil yang sering kena razia sementara perut mereka terus merengek jika tak menjual banyak dagangan atau jasa -- hanya akan terus melakukan pelanggaran karena pemerintah tidak memberikan mereka solusi dan kepastian di masa depan.

Alhasil, masyarakat dapat jatuh ke dalam kekacauan tanpa ada pihak yang terlegitimasi untuk mengatur mereka. Para pemegang kebijakan kehilangan tangannya karena otoritas sudah tidak diakui. Kegagalan tak diakui dan langkah pemerintah ke depan terlihat bakal suram.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, permintaan maaf resmi menjadi komunikasi publik yang penting agar pemerintah dapat kembali mendapatkan kepercayaan publik. Permintaan maaf resmi adalah bentuk komunikasi yang menekankan bahwa pemerintah mendengar kekecewaan masyarakat sekaligus mengakui kebijakan mereka yang bermasalah. Dengan meminta maaf, suara publik merasa didengarkan sehingga tumbuh lagi rasa kebersamaan antara masyarakat dengan pemerintahan. Selain itu, langkah permintaan maaf saja tidak cukup. Pemerintah harus menindaklanjuti permintaan maaf itu dengan membuktikan bahwa mereka mampu mengatasi pandemi dengan lebih baik dan mendengarkan suara-suara publik. Dengan keberlanjutan minta maaf itu, maka kewibawaan pemerintah meningkat dan masyarakat bersedia mengikuti otoritas dalam suatu kebijakan selama mereka diyakinkan tak akan mendapatkan kerugian.

Dalam situasi krisis, otoritas pemerintah sangat diperlukan karena hanya struktur merekalah yang dapat melakukan penanganan krisis skala besar dengan koordinasi dengan baik dibandingkan dengan langkah-langkah sporadis masyarakat. Tanpa ketersediaan masyarakat pun, arahan-arahan pemerintah dalam suatu kebijakan tidak akan diikuti.

Kebijakan pun hanya menjadi perintah-perintah yang sia-sia. Maka dari itu, kesediaan masyarakat untuk kembali percaya dan bergerak bersama pemerintah menjadi sebuah langkah vital dalam menangani krisis pandemi ini. Di sisi lain, masyarakat harus terus mengawal kerja pemerintah dengan mengkritik sekaligus mengikuti kebijakan yang pantas diikuti. Sementara itu, pemerintah harus terus menjaga kepercayaan publik dengan kinerjanya dan mendengar setiap keluhan yang datang sebagai sebuah kewajaran dalam sebuah kebijakan yang tak mungkin sempurna.

Dalam satu krisis, pemerintah mungkin saja meminta maaf lebih dari sekali. Hal itu adalah buah kegagalan kembali pemerintah dalam menangani pandemi. Permintaan maaf berulang harus dihindari karena permintaan maaf berulang memberikan sinyal bagi publik untuk mulai tidak mempercayai permintaan maaf lagi karena kekecewaan hanya akan berulang kembali. Hal ini sama saja dengan kita. Jika seseorang telah berlaku salah pada kita dan minta maaf, lalu melakukan hal yang sama dan kembali minta maaf, apakah kita dapat dengan mudah percaya untuk memaafkannya kembali?

Pada akhirnya, perihal permintaan maaf ini mestinya menjadi sebuah norma dalam praktik pemerintahan. Menyangkut Indonesia, itu artinya perubahan cara komunikasi dan kinerja pejabat wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Perilaku acuh tak acuh yang selama ini dipertontonkan ke media jangan sampai terulang kembali, jika memang benar ingin membenahi citra mereka di mata publik. Terlalu sering meminta maaf juga tidak akan membuahkan hasil positif, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh sebab itu, kinerja pejabat pemerintah harus diperbaiki agar tidak perlu memohon maaf kepada masyarakat. Warga juga punya peranan penting dalam mengawasi itu.

Tentu saja harapan ini ditulis dengan sedikit menafikan realita yang ada. Pasalnya, budaya meminta maaf masih belum biasa dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Akan tetapi, ada secercah harapan membuncah. Baru-baru ini, Luhut mengakui jika kondisi lonjakan kasus infeksi Covid-19 di Indonesia masih di luar kendali. Hal ini merevisi pernyataannya yang lalu, bahwa lonjakan kasus masih "terkendali". Ya, mirip dengan kasus PM Belanda. Semoga saja, ini bukan sebuah kesalahan dalam matriks dan dapat menjadi momentum penggerak penerapan norma meminta maaf dalam keseharian pemerintah Indonesia.

Referensi

Covid-19: Dutch PM Rutte 'sorry for easing restrictions too soon'. (2012, July 12). BBC News. https://www.bbc.com/news/world-europe-57811538



Rejeki Nomplok di Tengah Kondisi Ekonomi yang Jeblok

Penulis: Alma Delia Sukma & Refina Anjani Puspita

Penyunting: Masako Septianingrum Ompusunggu

Pada 11 Maret 2020, direktur jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam briefing media menyatakan persebaran virus COVID-19 sebagai pandemi global. Sejak saat itu, virus tersebut telah menginfeksi sekitar 200 juta orang dan menelan 4,5 juta jiwa di seluruh dunia (World Health Organization, 2021). Tentu, pengaruh virus itu tak bisa dianggap enteng mengingat ia telah tersebar ke pelbagai penjuru dunia. Selain dampaknya yang nyata pada kesehatan publik, aktivitas ekonomi dipaksa mandeg, dialihkan atau berlangsung di bawah tekanan ikhtiar keras mengatasi penyebaran virus itu. Aktivitas ekonomi yang sontak mandeg tersebut telah mendesak sejumlah negara ke dalam tubir resesi, ditandai dengan gulung tikarnya dunia usaha dan pemutusan hubungan kerja akibat merosotnya pendapatan perusahaan. Pada kuartal ketiga 2020, Indonesia mengalami resesi yang ditandai oleh kontraksi ekonomi sebesar 3,49 persen (Fauzia, 2020). Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun lalu, sebanyak 9,77 juta orang tidak memiliki pekerjaan, yang menandakan peningkatan angka pengangguran ketimbang masa sebelumnya.

Berkaca pada merosotnya ekonomi itu, pandemi telah mendatangkan 'rejeki nomplok' atau banyak keuntungan bagi sejumlah kaum berada. Harian Kompas melansir laporan yang menyebut jumlah orang kaya dan sangat kaya meningkat tajam di Indonesia. Menyitir temuan dari Credit Suisse, laporan Kompas menyebut mereka yang memiliki kekayaan bersih di atas 100 juta dolar Amerika pada 2020 jumlahnya meningkat sebesar 22,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Credit Suisse, 2021). Dengan kata lain, individu yang memiliki kekayaan tersebut berjumlah 417 orang (Syahrial, 2021). Memperhadapkan petaka ekonomi yang dialami oleh individu atau pengusaha kecil dengan kelompok sangat kaya menyingkap adanya kesenjangan kronis di negeri ini. Hal ini menuntun kita pada kenyataan pahit bahwa pandemi telah meneguhkan kesenjangan antara kaum elit dengan kelas pekerja.

Berdasarkan laporan Credit Suisse tentang kekayaan global, bertambahnya kekayaan dari kalangan berpunya antara lain disebabkan oleh kebijakan yang menurunkan suku bunga atas harga saham dan perumahan serta nilai tukar uang yang fluktuatif. Ketidakpastian perdagangan dunia dan respon nasional terhadap pandemi telah mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan ekonomi demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu implementasinya dilakukan dengan menurunkan suku bunga atas harga saham dan perumahan. Terlindungi dari dampak negatif dari ekonomi karena pengurangan tenaga kerja serta merosotnya pendapatan, kalangan berpunya itu tak terpengaruh, tapi justru diuntungkan secara langsung oleh penurunan suku bunga. Di samping itu, mereka menangguk keuntungan dari nilai tukar uang yang fluktuatif. Inilah yang menyebabkan terjadinya akumulasi kekayaan di kalangan elit selama pandemi. Meskipun temuan Credit Suisse bersifat umum dalam menunjukkan bertambahnya kekayaan kaum berpunya, ia barangkali menyodorkan penjelasan tren meningkatnya kekayaan para orang kaya di Indonesia. Ini karena Indonesia juga menerapkan kebijakan yang sama yakni menurunkan suku bunga atas harga saham.

Kendatipun lembaga think-tank seperti Inequality.org menunjukkan intervensi negara menjadi cara mengendalikan buruknya kesenjangan (misalnya, menaikkan pajak mereka yang sangat kaya untuk membiayai pasokan dan distribusi vaksin) (Collins, 2021), tetap muncul kesangsian apakah hal itu mampu menutup kesenjangan yang ada. Bagaimanapun, patronase dan korupsi yang masih kental mewarnai pengelolaan pemerintahan di Indonesia tidaklah memberi jaminan bahwa intervensi negara semata bisa menjadi penawar bagi kesenjangan ekonomi (Turner, et. al., 2019). Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan Menteri Sosial, Juliani Batubara, menjadi contoh gamblang masih panjangnya perjuangan melawan korupsi yang telah memakan korban kalangan yang tak beruntung (BBC, 2021). Ditambah lagi, pelemahan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang telah menyingkirkan pegawai berintegritas menunjukkan perjuangan melawan korupsi harus terus dilakukan. Karena itu, menaikkan pajak tidaklah menjamin sumber daya yang terkumpul itu bakal mencapai sasaran yang diharapkan. Kenyataannya, ia justru mengarah pada elit politik sehingga kian memperparah kesenjangan di Indonesia. Kelangkaan sumber daya dan korupsi kaum elit pada bantuan sosial bagi kalangan yang tak berpunya hanya menegaskan penyakit tersembunyi dari pandemi.

Belum lagi ancaman komersialisasi vaksin yang sempat beredar rumornya pada pertengahan tahun 2021, dimana kesenjangan dan ketimpangan ditampilkan secara nyata. Hak untuk hidup sehat, secara observasi sederhana merupakan hak paling fundamental, bukan lagi hakiki, tetapi ditentukan oleh strata sosio-ekonomi suatu masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Naomi Klein tentang kapitalisme bencana dimana ada penggerebekan yang diatur di ruang publik setelah

peristiwa bencana, penanganan bencana kemudian dirancang sebagai penciptaan peluang pasar yang menarik. Jaminan kesehatan dasar yang menjadi tanggung jawab negara, dialihkan penanganannya ke dalam mekanisme pasar (Klein, 2008). Setelah mendapatkan tanggapan dan kritikan dari masyarakat, akhirnya rencana untuk mengkomersilkan vaksin dicabut (Ramadhansari, 2021). Namun, adanya pertimbangan untuk mengeksekusi rencana itu memperlihatkan keberpihakan negara kepada pasar, bukan rakyat.

Pada akhirnya, kita tahu, pandemi COVID-19 mendatangkan petaka ekonomi bagi banyak orang. Akan tetapi, ironisnya, jumlah kalangan yang memiliki kekayaan besar di Indonesia serta kerentanan masyarakat di tingkat terbawah strata sosio-ekonomi sama-sama meningkat. Ini menunjukkan betapa pandemi kian memperparah kesenjangan yang telah ada sebelumnya. Selain menyebabkan kematian banyak orang, rupanya pandemi COVID-19 menciptakan jurang kesenjangan kian menganga.

Daftar Pustaka

(2020, November 5). Pengangguran RI melonjak jadi 9,77 juta per Agustus 2020. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201105124256-532-566255/pengangguran-ri-melonjak-jadi-977-juta-per-agustus-2020

(2021, Agustus 23). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak - 'Terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan'. BBC Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733

Aqil, A. M. I. (2021, Mei 4). Top KPK investigators may lose jobs after failing controversial civics test. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/news/2021/05/04/kpk-to-lose-investigators-who-reportedly-failed-test.html

Collins, C. (2021, Agustus 11). Global billionaire pandemic wealth gains surge to $5.5 trillion. Inequality.org. https://inequality.org/great-divide/global-billionaire-pandemic-wealth-surges/

Credit Suisse Research Institute. (2021). Global wealth report 2021.

Fauzia, M. (2020, November 5). Indonesia resmi resesi, ekonomi kuartal iii-2020 minus 3,49 persen. Kompas.com. https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all

Klein, Naomi. (2008). The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. London: Penguin Books.

Ramadhansari, I. (2021). Vaksin Berbayar Batal, Kimia Farma (KAEF) Fokus Vaksinasi Gotong Royong. Market - Bisnis.com. Retrieved 26 October 2021, from https://market.bisnis.com/read/20210718/192/1419112/vaksin-berbayar-batal-kimia-farma-kaef-fokus-vaksinasi-gotong-royong

Syahrial, M. (2021, Juli 17). Di tengah pandemi Covid-19, jumlah orang kaya di Indonesia meningkat. Kompas.com. https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/17/093200465/di-tengah-pandemi-covid-19-jumlah-orang-kaya-di-indonesia-meningkat-

Turner, M., Prasojo, E. & Sumarwono, R. (2019). The challenge of reforming big bureaucracy in Indonesia. Policy Studies. DOI: 10.1080/01442872.2019.1708301

World Health Organization. (2020, Maret 11). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

World Health Organization. (n.d.). WHO Coronavirus (COVID-19) dashboard. World Health Organization. Retrieved 31 Agustus 2021, from https://covid19.who.int



Dominasi Keuntungan dalam Hubungan Triple Bottom Line Perusahaan Toba Pulp Lestari

Penulis: Salsabila Y. Afiya & Gantar E. Sinaga
Penyunting: Sarah F. Dinestiningtyas

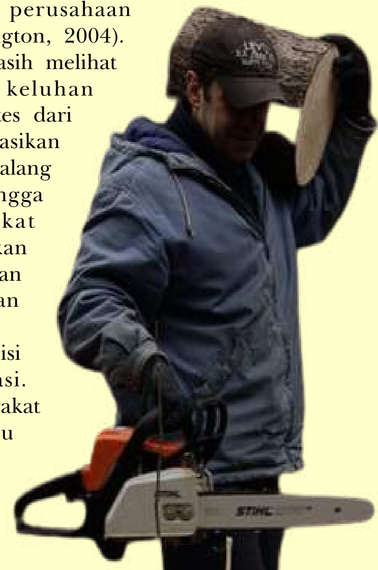
Tulisan ini berlatar tempat di sekitar wilayah Danau Toba, Sumatera Utara. Wilayah tersebut diidentifikasi sebagai wilayah adat yang dihuni secara turun temurun oleh masyarakat adat Batak. Hingga tahun 1970-an, penghasilan masyarakat adat Batak setempat bergantung pada lahan hutan di atas tanah adat mereka. Beberapa masyarakat juga telah menyerahkan tanah adat mereka kepada pemerintah untuk difungsikan sebagai hutan reboisasi secara sukarela. Hal tersebut kemudian menandakan bahwa masyarakat punya kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan. Sebelum berubah fungsi menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Toba Pulp Lestari (TPL), lahan hutan tersebut dimanfaatkan warga setempat untuk mengambil rotan, kayu, hingga kemenyan (Tamba & Manurung, 2015). Sebagai masyarakat adat yang tinggal di wilayah hutan, ketersediaan lahan memiliki peran penting dalam perekonomian maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Tak hanya menjadi sumber rezeki, lahan hutan tersebut juga menopang kebutuhan pangan dan papan masyarakat. Beralihnya fungsi hutan adat menjadi HTI pada akhirnya menimbulkan banyak dampak sosial serta lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Hutan yang awalnya dihuni oleh pohon karet dan pohon-pohon besar lainnya, dibabat habis oleh PT TPL untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka terhadap eukaliptus. Masyarakat sekitar melihat kegiatan industri yang dilakukan PT TPL sebagai bentuk perusakan hutan sekaligus pencemaran ekosistem lingkungan sekitar. Tidak jarang masyarakat adat Batak terlibat bentrok dengan PT TPL sebagai upaya dalam menghentikan penebangan hutan dan mempertahankan tanah adat mereka. Upaya tersebut seringkali direspon PT TPL dengan tindakan kriminalisasi dan melaporkan warga terkait kepada polisi. Tindakan kriminalisasi ini telah dilakukan terhadap lebih dari 70 warga dan berpotensi diperkeruh oleh sikap diskriminasi kepolisian terhadap masyarakat adat (Karokaro, 2021). Upaya masyarakat adat Batak untuk "menyelamatkan" lahan hutan mereka dari kegiatan industri PT TPL juga didukung beberapa LSM seperti Walhi Sumut dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak. Mereka bersama-sama memperjuangkan kelestarian hutan sekitar Danau Toba dengan menuntut pencabutan hak konsesi PT TPL.

Konflik berkepanjangan antara masyarakat adat Batak dan PT TPL sampai saat ini belum menemukan titik terang. Hal ini disebabkan fokus dari PT TPL sebagai perusahaan industri bukanlah lingkungan dan sosial, melainkan profit. Padahal, untuk menjaga keberlanjutan perusahaan, penting untuk menyeimbangkan fokus antara Triple Bottom Line (TBL), yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kontras dengan doktrin Friedman yang menganggap bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan bisnis adalah menghasilkan profit, konsep TBL ini mengikutsertakan lingkungan dan sosial sebagai tanggung jawab perusahaan yang bobotnya tidak lebih kecil dari profit (Elkington, 1997).

Akhir-akhir ini, adanya ekspansi dan pelanggengan kembali prinsip industrialisasi lahan dengan penanaman bibit eukaliptus secara monokultur semakin memperkuat ketimpangan dalam agenda perusahaan PT TPL dalam mewujudkan lapangan kerja yang mampu mendukung keberlanjutan ekonominya. Agenda kebijakan PT TPL yang berkembang dari hasil advokasi masyarakat lokal diterima dengan klaim transformasi paradigma baru yang dibawa PT TPL melalui komitmen 'nol deforestasi, nol eksploitasi, nol gambut' sejak tahun 2015 (Morgan, 2017). Klaim ini kemudian dijadikan pedoman dan pengemasan profil industri produksi bahan pengolah kertas berkelanjutan melalui laporan keberlanjutan mereka yang terbit tahun 2018 (Toba Pulp Lestari, 2018). Beberapa poin menarik yang ingin dibawa oleh PT TPL dari la-poran berkelanjutannya sebagai klaim bahwa perusahaan telah merespon suara masyarakat dari tahun ke tahun adalah dengan menciptakan mekanisme terstruktur yang mampu memberikan jaminan untuk tidak mengambil alih hak tanah masyarakat maupun perusakan lingkungan dalam bentuk apapun melalui pengawasan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, PT TPL juga mengupayakan kolaborasi pendanaan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dan pengawasan melalui beberapa LSM agar dapat menyokong fokus perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Ironisnya, kolaborasi antara LSM maupun pemangku pemerintah serta mekanisme yang ditengarai oleh pemerintah juga termasuk konsep resolusi yang dibawa oleh doktrin Friedman dalam pemikiran TBL milik Elkington, sebagaimana telah dikatakan bahwa era Green Economy menjadi masa depan bagi industri untuk melanggengkan sentimen keberlanjutan dalam perusahaannya. Maka dari itu, kolaborasi dan transparansi dari setiap aktor yang mungkin terlibat baik dari pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan perlu dijadikan konsiderasi rekan kerja sama demi tercapainya satu visi dalam realisasi moda kapitalisme non- eksploitatif yang mendorong paradigma baru mengenai inklusivitas perusahaan (Elkington, 1997; Elkington, 2004). Sayangnya, PT TPL masih melihat bahwa advokasi dan keluhan hingga gelombang protes dari masyarakat lokal dinegasikan sebagai sentimen penghalang majunya industri sehingga kesempatan masyarakat untuk dapat memberikan kompensasi ataupun alasan untuk mengikuti arahan perusahaan menjadi semakin jauh dari kondisi yang dapat dilegitimasi. Padahal, elemen masyarakat adalah unsur penentu sebuah perusahaan untuk menciptakan kestabilan dan keberlanjutan.



Adanya insiden Natumika pada tanggal 18 Mei 2021 yang terjadi akibat bentrok aparat dengan masyarakat yang melakukan aksi untuk menunjukkan ketidaksetujuan masyarakat pemukiman adat Natumika terhadap konsesi lahan mereka untuk ditanami pohon eukaliptus sebagai bahan baku pengolahan bubur kertas dan tekstil oleh PT TPL (Suhardiman, 2021), menandakan adanya tekanan represif yang dirasakan langsung oleh masyarakat adat—dalam konteks ini kelompok masyarakat adat di Toba merasa kehidupan dan dinamika sosialnya terusik dengan eksploitasi lahan yang menyebabkan daerah resapan air sekitar ekosistem pemukiman berkurang, pencemaran air akibat pembuangan limbah industri, dan penurunan ekonomi akibat degradasi kualitas pertanian bagi penduduk agraris kelompok adat Natumika.

Keresahan masyarakat Natumika ini pun telah dirasakan oleh berbagai kelompok desa di daerah Sumatera Utara. Banyak warga mengalami ancaman bahkan tindakan kekerasan yang secara eksplisit dilakukan oleh pihak-pihak dari PT TPL sendiri (Morgan, 2017). Perlu diketahui bahwa tanah adat warisan Batak tersebut merupakan aset lokal yang dipergunakan rakyat sebagai sumber modal mata pencaharian. Melalui budidaya tanaman endemik, warga lokal menanam tanaman Styrax benzoin yang dikenal pula sebagai pohon Kemenyan (Morgan, 2017). Kecenderungan PT TPL dalam mengkriminalisasi dan melanggengkan budaya kekerasan dalam penanganan konflik terhadap masyarakat adat juga merupakan bentuk pembiaran. Salah satu faktor yang memberikan PT TPL pembebasan dan kelonggaran dalam pengawasan ialah karena tertanamnya impunitas hukum. Hal ini tak terlepas dari latar belakang perusahaan yang telah berkembang di Tanah Batak sejak era Orde Baru, ketika perusahaannya masih bernamakan Inti Indo Rayon Utama Tbk. Pemerintah pada masa itu dengan kebijakan trilogi pembangunannya juga melegalkan bentuk eksplorasi dan industrialisasi lahan ekosistem manapun sebagai bentuk investasi nasional demi mencapai target pembangunan. Maka dengan adanya pembangunan, konsekuensi dari adanya komersialisasi lahan adalah masyarakat yang terpinggirkan dan tidak memiliki daya di mata hukum. Meski telah direvisi, undang-undang kehutanan yang melegalisasi PT TPL seperti SK.704/Menhut-II/2013 mengenai Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman PT. Toba Pulp Lestari yang sudah melewati batas hingga sekarang kerap mengembangkan luas lahannya dari angka 171.913 hektar(Simamora, 2015). Jumlah ini tentunya telah memakan sebagian besar lahan masyarakat adat dan secara jelas telah melanggar ketentuan hukum mengenai perlindungan masyarakat adat yang tercantum dalam Surat Edaran Menhut No. SE.1/Menhut-II/2012. Namun hingga kini, PT TPL tetap melanjutkan mekanisme "keberlanjutan"-nya seolah hal tersebut bukanlah sebuah isu signifikan.

Mitigasi kerusakan yang disebabkan PT TPL pada tanah dan keadaan sosial masyarakat adat Toba dapat dipahami dan diresolusikan dengan mendukung advokasi kepentingan masyarakat adat itu sendiri. Berlandaskan konsep Triple Bottom line (TBL), upaya perwujudan perusahaan yang mampu menyeimbangkan antara masyarakat (people), lingkungan (planet), dan keuntungan (profit) sudah menjadi tanggung jawab semua aktor yang terlibat aktif dalam pelaksanaan maupun bagi mereka yang terkena pengaruh dari efek industrialisasi nasional. Layaknya sebuah industri yang memiliki pengaruh sebesar pemerintahan, mereka yang memiliki modal dan kapasitas perlu mendahulukan kelompok kecil yang ikut terpengaruh dalam perputaran kapitalisme. Ketika perusahaan berusaha memelintir roda hukum dan pemerintahan—terkhususnya industri yang terjun langsung dan bersifat destruktif terhadap keadaan sosial dan lingkungannya—maka melalui gerakan akar rumput, masyarakat akan menuntut penolakan apapun yang melindungi suatu korporasi hingga akhirnya perusahaan itu tidak sanggup memijakkan "kaki penindas"-nya.

Mitigasi kerusakan yang disebabkan PT TPL pada tanah dan keadaan sosial masyarakat adat Toba dapat dipahami dan diresolusikan dengan mendukung advokasi kepentingan masyarakat adat itu sendiri. Berlandaskan konsep Triple Bottom line (TBL), upaya perwujudan perusahaan yang mampu menyeimbangkan antara masyarakat (people), lingkungan (planet), dan keuntungan (profit) sudah menjadi tanggung jawab semua aktor yang terlibat aktif dalam pelaksanaan maupun bagi mereka yang terkena pengaruh dari efek industrialisasi nasional. Layaknya sebuah industri yang memiliki pengaruh sebesar pemerintahan, mereka yang memiliki modal dan kapasitas perlu mendahulukan kelompok kecil yang ikut terpengaruh dalam perputaran kapitalisme. Ketika perusahaan berusaha memelintir roda hukum dan pemerintahan—terkhususnya industri yang terjun langsung dan bersifat destruktif terhadap keadaan sosial dan lingkungannya—maka melalui gerakan akar rumput, masyarakat akan menuntut penolakan apapun yang melindungi suatu korporasi hingga akhirnya perusahaan itu tidak sanggup memijakkan "kaki penindas"-nya.

Daftar Referensi

Elkington, J. B. (1997) Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone Publishing.

Elkington, J. B. (2004). Enter the Triple Bottom Line, 2-8. Retrieved July 18, 2021, from: https://www.johnelkington.com/archive/TBL-elkington-chapter.pdf.

Karokaro, A. S. (2021, April 7). Konflik Lahan dan Kerusakan Lingkungan Terus Terjadi dalam Operasi PT TPL. Retrieved Juli 15, 2021, from Mongabay: https://www.mongabay.co.id/2021/04/07/konflik-lahan-dan-kerusakan-lingkungan-terus-terjadi-dalam-operasi-tpl/.

Morgan, B. (2017, Juni 9). Ini saatnya PT Toba Pulp Lestari memegang janjinya. Retrieved Juli 18, 2021, from Rainforest Action Watch (RAN). https://www.ran.org/the-understory/ini_saatnya_pt_toba_pulp_lestari_memegang_janjinya/

Simamora, R. (2015, November 5). PT TPL Dituding Tidak Mematuhi Aturan di Negara Ini. Retrieved Juli 18, 2021, from kompasiana: https://www.kompasiana.com/iwanmora/563afc4d52f9fd0f07173c4e/pt-tpl-dituding-tidak-mematuhi-aturan-di-negara-ini.

Suhardiman. (2021, Mei 18). Bentrok dengan Pihak TPL, Masyarakat Adat Natumingka Alami Luka-luka. Retrieved Juli 18, 2021, from suarasumut.id: https://sumut.suara.com/read/2021/05/18/185454/bentrok-dengan-pihak-pt-tpl-masyarakat-adat-natumingka-alami-luka-luka?page=all.

Tamba, P., & Manurung, R. (2015). ADAPTASI MASYARAKAT DALAM MERESPON PERUBAHAN FUNGSI HUTAN. Perspektif Sosiologi, 3(1), 150-164.

Toba Pulp Lestari. (2018). Laporan Keberlanjutan 2018. Retrieved Juli 18, 2021: https://www.tobapulp.com/wp-content/uploads/2021/02/SR2018-INDO.pdf.

HA-
NYUT

Cipta: Najwa Ahila
Penyunting: Aprilia Handriyastuti

Habis napas, timbul tenggelam, hampir karam
Tiap kejap, bintang kejora sapa pelupuk netra
Pijar nyala silih ganti gelap gulita
Lambai-lambai tak ujung gapai
Debur disusul dering lenyap, dibayar lunas sunyi sekejap
Hilang akal, lenyap alam sadar

Sombongnya manusia, yang abadi dibilang sirna
Lepas kecup ombak bahar, nyawa pulang pada tubuh yang gusar
Indra yang panca masih berfungsi, bukti diri masih disini
Dihirupnya abadi dalam sepintas
Diseretnya kaki menuju cadas

Leher ditunduk lihat kawan yang mengantar pulang
“Terimakasih. Janji tak akan lagi bertandang”
Dibisiknya parak pada kecipak ombak
Kain kuyup saksi bisu memeluk pelik
Rupanya masih punya asa,hidup ternyata masih cantik



Melawan Arus Kapitalisme Abad ke-21 Dengan Mark Greif

Penulis: Ni Made Diah Apsari Dewi; Penyunting: Langit G. M. Hartono



Bayangkan bahwa terdapat tokoh bernama Andi. Dia pergi ke gimnasium tiap hari sambil mendengarkan band pop seperti Radiohead, lalu makan siang salad (yang rasanya aneh tapi konon membuat kita lebih sehat) dan minum es kopi susu. Dia bercita-cita berkeliling dunia. Bagaimana caranya belum dipikirkan, tapi setidaknya akar tujuannya pasti: ia ingin merasakan semua pengalaman yang ditawarkan hidup. Dia menjaga feed sosial medianya rapi, mengkurasi pakaiannya dengan teliti, dan kecanduan buku pengembangan diri.

Terdengar familiar? Mungkin Andi terdengar seperti doppelganger-mu atau setidaknya ada beberapa keinginan dan kecenderungan Andi yang juga menjadi bagian dari kepribadianmu. Mungkin kamu juga ingin lebih sehat, lebih langsing, lebih berotot, lebih sering berpetualang, lebih dewasa, dan lebih rapi. Selamat, layaknya Andi, kamu merupakan anak emas kapitalisme abad ke-21. Mark Greif melalui bukunya Against Everything mendorong pembaca yang identitasnya tak terlepas dari arus perkembangan kapitalisme untuk bertanya satu hal: Kenapa?. Kenapa kamu ingin menjadi lebih langsing atau berotot dengan berdiet atau berolahraga? Kenapa pengalaman yang banyak penting bagimu? Kenapa kamu bermeditasi? Kenapa kamu memiliki preferensi, rutinitas, dan identitas yang kamu miliki sekarang? Kenapa kamu tak jauh berbeda dengan individu lainnya dalam struktur yang kapitalis?

Kumpulan esai dalam Against Everything melihat realita dengan kritis dan pesimis. Mulai dari pembahasan tentang kegandrungan kita untuk pergi ke gimnasium sampai kesenangan kita mendengarkan musik rap dan pop, Greif menepati janjinya yang terpampang jelas dalam judul buku; ia memberikan argumen yang kuat untuk menentang "kenormalan" dari segala fitur kehidupan modern. Tujuan utama Greif dalam setiap esainya adalah untuk menunjukkan seberapa kuatnya akar-akar kapitalisme dalam mengatur kehidupan manusia. Contohnya, dalam tulisannya mengenai olahraga, ia berargumen bahwa olahraga tak lagi dilakukan untuk menjaga kesehatan. Manusia modern berolahraga karena manusia senang mengkuantifikasikan hidupnya (dari jarak berlari, tingkat kolesterol, atau berat badan); karena kita terobsesi mencapai bentuk tubuh ideal (riset mengatakan bahwa korset eksternal yang digunakan pada zaman dulu kini berubah menjadi "korset internal" terlihat dari obsesi perempuan untuk mengecilkan perut dan membesarkan pinggang); dan karena berolahraga membuat kita merasa lebih baik dari orang lain. Greif menemukan bahwa di berbagai aspek kehidupan manusia, puluhan tahun perkembangan teknologi dan ekonomi yang membuat manusia lebih aman, bebas, dan berkelimpahan tidak membuat manusia lebih santai dalam menjalani hidup atau lebih fokus ke pengembangan moral. Manusia justru fokus pada penyempurnaan dirinya yang dilakukan terus menerus dengan menggunakan ideal-ideal fana dan absurd sebagai bintang utara.

Greif kerap menggunakan referensi yang lebih terkenal di dunia Barat, sehingga esainya kadang sulit dimengerti tanpa pengetahuan dasar tentang budaya Barat kontemporer. Terlepas dari itu, esai-esai Greif benar-benar brilian. Esai yang ada disusun dengan baik; esai refleksi mengenai hal-hal superfisial seperti musik dan olahraga selalu diikuti dengan refleksi mengenai arti hidup. Greif seakan membuat roti isi yang membuat pembaca yang memakannya merasakan roller coaster emosional dan intelektual yang berujung pada evaluasi kritis yang luas, namun juga mendalam terhadap kehidupan kita. Esai juga berangkat dari pertanyaan-pertanyaan sederhana yang diam-diam pasti pernah kita tanyakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Greif tidak berusaha menjadi guru yang mampu menunjukkan pilihan terbaik dan jalan keluar dari struktur yang kapitalis. Ia mengakui kemanusiaannya dengan mengatakan bahwa ia pun tak tahu alternatif yang lebih baik, namun tak berarti evaluasi kritis terhadap kehidupan kapitalis menjadi tidak berarti.

Against Everything adalah harta karun tersembunyi yang patut dibaca oleh setiap orang yang hidup dalam struktur kapitalisme modern setidaknya sekali dalam seumur hidup. Buku ini adalah kesempatan kita untuk melihat hidup kita secara lebih mikroskopik sehingga kita bisa merefleksikan gambaran besar kehidupan yang selama ini kita amini. Tujuan Greif bukanlah untuk membuat kita lebih pesimistik dan sinis terhadap kehidupan. Ia justru mengajak kita untuk membayangkan alternatif kehidupan yang lebih baik dan bermakna karena, mengutip Greif, "to wish to be against everything is to want the world to be bigger than all of it"

Mitigasi kerusakan yang disebabkan PT TPL pada tanah dan keadaan sosial masyarakat adat Toba dapat dipahami dan diresolusikan dengan mendukung advokasi kepentingan masyarakat adat itu sendiri. Berlandaskan konsep Triple Bottom line (TBL), upaya perwujudan perusahaan yang mampu menyeimbangkan antara masyarakat (people), lingkungan (planet), dan keuntungan (profit) sudah menjadi tanggung jawab semua aktor yang terlibat aktif dalam pelaksanaan maupun bagi mereka yang terkena pengaruh dari efek industrialisasi nasional. Layaknya sebuah industri yang memiliki pengaruh sebesar pemerintahan, mereka yang memiliki modal dan kapasitas perlu mendahulukan kelompok kecil yang ikut terpengaruh dalam perputaran kapitalisme. Ketika perusahaan berusaha memelintir roda hukum dan pemerintahan—terkhususnya industri yang terjun langsung dan bersifat destruktif terhadap keadaan sosial dan lingkungannya—maka melalui gerakan akar rumput, masyarakat akan menuntut penolakan apapun yang melindungi suatu korporasi hingga akhirnya perusahaan itu tidak sanggup memijakkan "kaki penindas"-nya.

Identitas Buku

Judul	: *Against Everything: Essays*
Penulis	: Mark Greif
Tahun Terbit	: 2017
Penerbit	: Vintage

Reformulasi UKT dan Harapan Terciptanya Keadilan dalam Sistem UKT di FISIPOL UGM

Penulis: Arum Sekar Pertiwi & Christina Vania Winona
Penyunting: Aprilia Handriyastuti

Permasalahan uang kuliah tunggal selalu menjadi sorotan menjelang pergantian semester di UGM, tidak terkecuali di FISIPOL. Hingga saat ini, sistem UKT diterapkan berdasarkan mekanisme subsidi silang agar seluruh mahasiswa mengeluarkan pengorbanan biaya yang sama besarnya. Sayangnya, semangat subsidi silang yang adil belum sepenuhnya muncul dalam mekanisme UKT di FISIPOL. Hal ini dapat dilihat dari besaran UKT terhadap penghasilan yang dibayarkan mahasiswa golongan UKT tingkat atas relatif lebih sedikit dibandingkan dengan mahasiswa golongan UKT tingkat bawah. Penyesuaian UKT secara permanen pun sulit didapatkan karena terkendala beberapa persyaratan. Banyak mahasiswa yang mengalami perubahan ekonomi jangka panjang, tetapi tidak memenuhi syarat tersebut sehingga mereka pun harus mengajukan penurunan UKT tiap semester. Hal ini mendorong DEMA FISIPOL untuk melakukan konsolidasi dengan pihak fakultas mengenai reformulasi UKT. DEMA FISIPOL juga mengadakan riset tentang reformulasi UKT pada 16-25 Mei 2021.



Sebanyak 389 mahasiswa FISIPOL menjadi responden dalam riset ini. Terdapat tiga aspek yang dilihat, yaitu kondisi finansial, persepsi terhadap UKT, dan konsensus akan usulan reformulasi UKT. Hasil riset menunjukkan bahwa 58,61% mahasiswa mengalami kondisi finansial yang lebih buruk daripada tahun lalu. Sebanyak 58,10% mahasiswa bahkan harus melakukan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, seperti kerja paruh waktu. Sebanyak 70% mahasiswa merasa bahwa program UKT belum berjalan dengan baik. Sebagian mahasiswa menilai bahwa UKT yang diterima belum sesuai dengan kondisi finansial mereka. Alokasi UKT selama masa pandemi juga dirasa belum tepat sasaran. Dari hasil riset tersebut disimpulkan bahwa reformulasi UKT dengan mempertimbangkan rasio pengorbanan yang lebih adil perlu dilakukan.

Dalam riset ini, ditemukan adanya ketimpangan dalam nominal UKT yang harus dibayarkan. Rata-rata mahasiswa FISIPOL dari golongan UKT II hingga V nyatanya harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk membayar UKT. Sebaliknya, rata-rata mahasiswa dari golongan UKT VI hingga VIII justru mengeluarkan biaya lebih sedikit untuk membayar UKT. Misalnya, mahasiswa MKP golongan UKT IV harus mengeluarkan biaya 6,33% lebih banyak untuk membayar UKT. Hal ini berbeda dengan mahasiswa MKP golongan UKT VII yang mengeluarkan biaya 2,75% lebih sedikit untuk membayar UKT. Padahal dalam subsidi silang seharusnya terdapat penyamarataan pengorbanan seluruh golongan agar lebih adil, bukan sebatas pada nominal UKT saja.

Hasil riset mengenai reformulasi UKT tersebut kemudian menjadi bahan konsolidasi kepada pihak fakultas. Namun, hasil riset tersebut belum dapat dikatakan representatif, terutama dilihat dari perspektif golongan UKT atas dan UKT bawah terkait jumlah UKT pasca-reformulasi. Atas dasar ini, DEMA memiliki rencana pengkajian ulang jumlah UKT yang sekiranya dapat diterima kedua belah pihak. Rencananya, DEMA akan membuat riset lanjutan sebagai bahan konsolidasi lebih lanjut. Selain itu, DEMA juga akan mengadakan pertemuan dengan Dekanat untuk membahas isu UKT.

Upaya reformulasi UKT juga terkendala birokrasi. Walaupun sudah ada bantuan advokasi dari DEMA dan juga HMD, birokrasi terkadang menyulitkan mahasiswa dalam memperjuangkan hak atas UKT yang lebih sesuai dengan kemampuan finansialnya setiap semester. Atas dasar ini, DEMA FISIPOL menyatakan bahwa pihak kampus seharusnya menyediakan hak tersebut secara aktif. Selain itu, sistem subsidi silang yang diberlakukan juga harus dibenahi agar dapat lebih adil.

Berkaca dari fenomena ini, menjadi penting untuk mahasiswa agar memiliki kesadaran terhadap permasalahan UKT. Sejatinya, UKT murah atau jika perlu gratis merupakan hak mahasiswa. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan public goods yang seharusnya disediakan negara. Mahasiswa perlu menyadari jika UKT merupakan masalah yang menimpa banyak orang. Menurut DEMA FISIPOL, walaupun sistem subsidi silang bukan merupakan sistem yang paling ideal, sistem ter-sebut perlu diperjuangkan agar lebih adil lagi. Hal ini bertujuan agar subsidi silang tidak hanya berupa jargon, tetapi juga secara nyata membantu mereka yang kesulitan untuk mendapat akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan. Dengan demikian, reformulasi UKT merupakan hal yang penting untuk diperjuangkan, terutama untuk membantu mahasiswa mendapatkan keadilan di dunia pendidikan.



Perjalanan Mencintai Diri Sendiri Bersama Baek Se Hee

Penulis: Adinda Safiratul; Penyunting: Ishlah Abidin Atmaja



Gangguan depresi, hingga saat ini masih mendapat stereotip yang kuat dari masyarakat. Depresi sering dipandang sebagai penyakit yang memalukan, bahkan mereka yang menderitanya dianggap sakit jiwa. Pandangan ini sama sekali tidak benar. Siapa pun dapat menderita depresi dan itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan mental mereka. Dalam buku yang ditulis oleh Baek Se Hee ini, ia bermaksud menyampaikan hal tersebut agar pembaca dapat memahami orang-orang dengan gangguan jiwa, depresi atau lainnya, dan bukannya menghakiminya.

Buku ini adalah kisah seorang Baek Se Hee, seorang wanita yang lahir pada tahun 1990, telah menempuh perkuliahan dengan mengambil jurusan sastra dan sekarang bekerja untuk sebuah perusahaan penerbitan. Selama dekade terakhir, ia menderita distimia, atau yang juga biasa dikenal sebagai Persistent Depressive Disorder (PDD) dalam dunia psikologi. Selain itu, Baek Se Hee juga menderita gangguan kecemasan. Setelah menjalani banyak sesi pengobatan dan konseling dengan banyak psikolog dan psikiater, Baek Se Hee akhirnya menemukan rumah sakit yang ia rasa mampu memberikan harapan positif atas kesembuhannya pada tahun 2017 dan menjadi tempatnya berobat dan berkonsultasi. Baek Se Hee menceritakan perjalanannya dari awal, dia bercerita tentang pengalamannya di masa kecil dan beberapa hal yang membentuk kepribadiannya setelah beranjak dewasa. Tidak hanya itu, Baek Se Hee menceritakan semua keluhannya, bahwa ia merasa dalam kehidupannya, ia sering merasa gelisah, hampa, tidak percaya diri, dan juga tertekan. Beberapa kali ia merasa sedih dan ingin menangis, lalu merasakan sebuah kekosongan di hatinya. Namun anehnya, di saat yang sama ia tetap pergi untuk makan tteokpokki. Ia juga mengatakan, setelah memakannya ia merasakan perasaan yang ambigu. Tidak merasa sedih, tidak pula merasa bahagia.

Bersama Baek Se Hee, pembaca perlahan-lahan diajak untuk menelaah kembali diri mereka dengan cara yang lebih baik. Selama perjalanannya, Baek Se Hee merasakan bagaimana rasanya berdamai dengan dirinya sendiri. Sepanjang membaca buku ini, banyak nilai positif yang menyadarkan pembaca betapa pentingnya berdamai dengan diri sendiri. Bahwa kita tidak perlu menetapkan standar tinggi dalam diri, berhenti memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan dan lakukan apa yang kita sukai dan membuat diri kita menjadi merasa nyaman. Dengan hal-hal sederhana seperti menjadi diri sendiri tanpa peduli orang lain akan beranggapan apa adalah salah satu yang bisa membuat anda mencintai diri sendiri.

Identitas Buku (dilansir dari *Kompasiana.com*)

Judul	: *I Want to Die but I Want to Eat Tteokpokki*
Pengarang	: Baek Se Hee
Penerjemah	: Hyacinta Louisa
Tahun Terbit	: 2019
Penerbit	: PT. Haru Media Sejahtera
Jumlah hal.	: 236 halaman
Genre	: Self Improvement

"Hal yang paling penting adalah perasaan senang dan gembira dari dalam diri Anda, tidak peduli apa yang orang lain pikir atau katakan. Saya harap Anda bisa memenuhi keinginan diri Anda terlebih dahulu, tanpa memikirkan apa yang dilihat oleh orang lain."

—— Baek Se Hee

Pelemahan KPK: Pembunuhan Bisu Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Penulis: Sekarini Wukirasih & Aldi Haydar Mulia
Penyunting: Najzeela Tayyima Elhikma



Jam menunjukkan pukul 15.23 ketika saya, Sekar, memasuki ruang pertemuan virtual yang telah saya reservasi beberapa jam sebelumnya. Tak lama berselang, rekan saya dalam wawancara sore hari ini, Tara, memasuki ruangan pertemuan. Bergabungnya Tara dalam ruang pertemuan online tersebut dengan cepat disusul oleh narasumber kami kali ini, yakni Zainal Arifin Mochtar (42). Beliau merupakan seorang ahli hukum tata negara Indonesia yang juga merupakan salah satu pemerhati pemberantasan korupsi serta dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sore itu, laki-laki yang kerap disapa oleh mahasiswanya sebagai Mas Uceng menyambut kami secara virtual di perpustakaan rumahnya dengan mengenakan kaus hijau bertuliskan Ewako. Setelah bertukar sapa dengan singkat, kami pun memulai diskusi mengenai pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diskusi kami mulai dengan beberapa pertanyaan: "Sejak didirikan pada tahun 2003, KPK dikatakan telah beberapa kali mengalami serangkaian upaya pelemahan. Sebenarnya apa yang dikatakan sebagai usaha pelemahan KPK ini? Mengapa upaya-upaya ini dapat terjadi in the first place dan kemudian terus berlanjut?"

Tak perlu jeda lama, Mas Uceng menjawab pertanyaan tersebut. "Kalau kita lihat, hingga masa Orde Baru, sudah banyak lembaga pemberantas korupsi yang dibuat oleh pemerintah. Namun, semua lembaga tersebut berakhir nahas karena tidak disematkannya kewenangan atau aturan pemerintah yang luar biasa dan tidak adanya dukungan negara." Dari sudut pandang Mas Uceng, KPK turut menemui resistansi serupa dari para oknum yang terpengaruh oleh upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. "Bedanya (dengan lembaga lain), aktor yang melakukan perlawanan terhadap KPK itu bukan cuma aktor swasta. Tapi kelihatannya aktor state juga enggak senang dengan upaya ini karena KPK kemudian masuk ke (ranah) pemerintah dan pimpinan-pimpinan politik serta penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan." lanjutnya.

Sepanjang pengamatannya, dosen FH UGM ini menemukan bahwa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para 'penolak' KPK bermacam-macam. Salah satunya adalah kriminalisasi para pimpinan KPK yang dinilai 'mengganggu' para aktor korup tersebut. Di samping kriminalisasi, upaya sistematis juga dilakukan dengan pengubahan, pengujian, dan pelumpuhan terhadap Undang-Undang (UU) KPK. Selain dua upaya tersebut, berbagai usaha penggembosan KPK juga telah dilakukan, seperti penarikan ulang para penyidik oleh kejaksaan atau kepolisian pada masa penyelidikan serta aksi teror terhadap para komisioner atau penyidik KPK.

"Dihadapkan dengan usaha-usaha ini," tutur Mas Uceng, "dulu pada zamannya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), KPK relatif mendapat perlindungan dari negara. Saya mengatakan relatif sebab bukan berarti (KPK) mendapatkan perlindungan luar biasa, tapi cenderung masih ada pimpinan negara yang memberikan perlindungan sederhana." Beberapa contoh bentuk perlindungan ini adalah adanya penolakan perubahan UU KPK dan pembentukan tim khusus pencari fakta saat terjadi kriminalisasi. Dalam hemat Mas Uceng, hal-hal tersebut cukup untuk melindungi KPK. Lebih jauh lagi, kala itu masyarakat sipil juga cukup kuat dalam membentengi KPK karena meletupnya semangat untuk mendorong gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Setelah menjabarkan hal ini, Mas Uceng mengambil jeda sejenak. Ia lalu menanggapi pertanyaan yang kami ajukan tentang alasan terus terjadinya pelemahan KPK. Mas Uceng berpendapat bahwa hal ini sangat bergantung pada sikap pemimpin negara yang memegang kendali. "Habis Joko Widodo naik (menjadi presiden) suasananya itu berbeda." ujarnya. "Di awal-awal, karena Jokowi terlanjur menjanjikan pemberantasan korupsi yang baik, ia relatif melakukan (perlindungan) yang sama. Ketika kasus Budi Gunawan, misalnya, dia masih melindungi (KPK). Tapi setelah kasus Budi Gunawan, terjadi perubahan drastis. Saat (KPK) mendapat berbagai serangan dari dari aktor politik maupun aktor lain, tidak ada perlindungan apa-apa." Mas Uceng berpendapat bahwa berkurangnya perlindungan negara terhadap badan penumpasan korupsi ini terlihat dari tidak dibentuknya tim pencari fakta saat beberapa orang dalam tubuh KPK dikriminalisasi.

Alih-alih mengimplementasikan prosedur tersebut, Presiden Jokowi langsung mengganti pimpinan KPK dan membiarkan mereka yang dikriminalisasi ditindak dengan proses hukum yang cenderung dilama-lamakan dan sulit untuk diberhentikan. Hal ini dianggap Mas Uceng sebagai bagian dari upaya infiltrasi KPK yang dilakukan dengan penempatan para komisioner abal-abal, diikuti oleh pemindahan begitu banyak polisi ke dalam KPK. "Di sini kita bukan membicarakan soal membenci polisi atau tidak, tetapi soal bagaimana bisa (kita) membentuk lembaga luar biasa untuk memberantas korupsi kalau kemudian kita memakai polisi dan jaksa terlalu banyak? Padahal, (dulunya) KPK dibentuk akibat adanya kegagalan dari kepolisian dan kejaksaan." ucapnya.

Sambil melepas kacamata dan mengusap matanya sejenak, Mas Uceng menambahkan, "Di luar lingkup tersebut, pemerintah juga memberi perlakuan berbeda terhadap UU. Kalau dulu, SBY itu langsung menolak (usulan revisi), sedangkan sekarang langsung disetujui. Hanya beberapa hari setelah (rancangan perubahan UU) dikirimkan ke Presiden, revisi itu langsung ditandatangani. Padahal, peraturan perundang-undangan kita kasih 60 hari buat (proses) itu." Tak berhenti disitu, Mas Uceng merasa bahwa kini tidak pernah lagi ada perlindungan terhadap teror. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Novel Baswedan. "Sampai sekarang siapa yang dibawa ke proses pengadilan jadi nggak jelas. (Jadinya) kayak peradilan dagelan. Tiba-tiba pelaku malah dapat hukuman yang sangat lemah, mengaku tidak sengaja, dan dikonstruksi jaksa sedemikian rupa." katanya. Fenomena ini selaras dengan apa yang telah terjadi sebelumnya, di mana lembaga pemberantasan korupsi akhirnya mati karena tidak adanya perlindungan negara dan melemahnya peraturan.

Sangat puas dengan jawaban komprehensif tersebut, kami menarik diskusi ini lebih dalam dengan bertanya tentang peran kuasa uang dan/atau aliansi politik-bisnis dalam dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia. "Nyaris, kita 'kan nggak punya analisis yang cukup (untuk mengatakan bahwa) negara tiba-tiba membenci KPK. Kecuali, kalau kita bicara soal

kepentingan bahwa partai-partai pendukung pemerintahan atau pemerintahnya sendiri terganggu kebiasaan koruptifnya." responnya tegas. "Nah, kebiasaan koruptif ini lahir dari relasi kuasa bisnis yang membahas tentang bagaimana partai dan negara mau mengakses uang negara melalui proses korupsi APBN dan kebijakan-kebijakan lainnya yang telah 'dibeli' dari awal. Ditambah lagi, akhir-akhir ini, KPK banyak menyasar bisnis di bidang ekstraksi sumber daya alam yang biasanya berkaitan dengan pejabat publik."

Lebih lanjutnya, Mas Uceng mencurigai sistem pemerintahan yang oligarkis sebagai biang kerok lain pergeseran komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. "Bisnis utama dari kaum oligarkis ini adalah mempertahankan kekayaannya. Makanya, (hal) yang paling mereka pedulikan adalah bagaimana seorang presiden atau pejabat publik bisa dibeli kewenangannya, (sehingga) bisa menjalankan apa yang mereka perintahkan. Sebagai bayaran, para oligarkis ini ikut memberi dukungan finansial ketika kontestasi pemilu dan lain sebagainya." terangnya. Terkait hal ini beliau menyatakan dengan gamblang bahwa uang, kuasa, senjata seringkali bertali-temali di negeri demokrasi baru seperti Indonesia.

Usai pertanyaan kedua kami terjawab, kami pun mengajukan kegelisahan selanjutnya kepada Mas Uceng. "Bagaimana dengan peran partai politik dalam masalah pelemahan KPK ini? Menukil peristiwa tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), partai politik hampir tidak bersuara mengenai nasib para pegawai tersebut. Apakah ini menandakan bahwa partai politik turut serta dalam lingkaran kuasa materialistik negara yang jauh dari niat pemberantasan korupsi?"

Seketika, beliau agak terganggu dengan frasa kuasa materialistik itu. Karena secara filosofis, kata "materialistik" kurang pas untuk menyebut fenomena ini. Mas Uceng lebih memilih untuk menyebut partai-partai politik tersebut sebagai pemburu rente. Ia kemudian menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh negara--termasuk DPR--untuk membunuh KPK. Mulai dari pengangkatan komisioner abal-abal yang memasukkan anggota kepolisian dalam tubuh KPK, memilih komisioner yang amat ditentang publik, merevisi UU KPK, hingga yang terbaru, TWK. TWK sendiri disebut Mas Uceng sebagai pembersihan anggota-anggota yang masih getol melawan praktik korupsi di Indonesia.

"Kalau pertanyaanmu adalah kenapa kemudian partai politik diam, ya, saya nggak tau. Satu-satunya catatan kita adalah balik ke persoalan partai politik juga yang berupaya untuk mengubah UU KPK, partai politik juga yang membawa komisioner abal-abal. Kalau kemudian TWK itu mereka amini, dan tidak mereka perbaiki, ya, wajar menurut saya. Bahkan lembaga-lembaga yang mau memperkuat atau memperbaiki kasus ini (KPK), seperti Ombudsman dan Komnas HAM, itu malah lembaga yang rajin diserang secara politik oleh mereka (partai politik)," ujarnya.

Lantas, bagi Mas Uceng, hal yang patut diperhatikan adalah bagaimana Presiden dapat menyelamatkan KPK. "Sebab kini banyak yang sangsi. Jangan-jangan, Presiden adalah salah satu aktor di balik pelemahan KPK itu." tuturnya. Asumsi ini tentu bukan tanpa alasan, mengingat sampai saat ini Presiden belum bertindak sedikit pun. Janji membuat Perppu hanya tinggal janji. Teriakan publik yang menuntut Presiden mengintervensi upaya ini cukup tergantung Presiden. "Apakah beliau akan menindaklanjuti teriakan-teriakan itu, termasuk temuan Ombudsman soal bermasalahnya TWK yang patut diapresiasi, atau malah akan cuek saja dan merestui matinya KPK?" tanyanya retoris.

Kami menutup wawancara sore itu dengan menanyakan perihal nihilnya keberhasilan rakyat dalam melawan pemerintah dan aliansi politik-bisnisnya yang korup. Apa ini tandanya rakyat tidak kuasa menghadapi mereka? Mas Uceng sekali lagi mengoreksi penggunaan diksi kami. Alih-alih "melawan," ia percaya bahwa esensi demokrasi sebenarnya adalah kontrol rakyat. Di Indonesia, kontrol itu relatif sudah dilakukan, bahkan upaya itu telah menyebabkan melayangnya nyawa dua mahasiswa ketika demonstrasi Revisi UU KPK. Namun, tetap saja Presiden tidak tergerak. "Jangan-jangan di Indonesia ini, bagi pemerintah dan politik, nyawa bukan lagi sesuatu yang berharga," imbuhnya.

Mas Uceng kemudian memaparkan berbagai halangan yang membatasi efektivitas kontrol rakyat terhadap pemerintah. Pertama, Pandemi Covid-19. Situasi ini dimanfaatkan pemerintah untuk mengurung ruang-ruang penyampaian aspirasi publik, yang utamanya dilakukan di muka umum dengan melibatkan banyak orang. Hanya aspirasi daring yang mungkin. Itu saja efektivitasnya sangat bergantung dengan mau tidaknya pemerintah menggubris pendapat-pendapat di laman maya. Pada saat yang sama, pemerintah menggunakan keadaan darurat ini untuk mempercepat agenda yang hendak mereka kejar, seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan UU Mahkamah Konstitusi.

Kedua, pemerintah makin tuli akan aspirasi masyarakat. Pemerintah tidak lagi membuka ruang yang cukup bagi penyampaian aspirasi. "Undang-undang yang seharusnya adalah aspirasi masyarakat, itu aspirasinya enggak dibuka, dibatasi (segmented aspiration). Biasanya udah cherry picking, tuh. Dipakai (oleh) orang-orang yang mendukung itu saja," sahutnya. Ketiga, terpecahnya masyarakat sipil. Hal ini terlihat dari "perseteruan" kaum cebong dan kampret/kadrun. Mereka yang mengkritik pemerintahan, dikatai kadrun/kampret. Pelabelan ini digunakan secara baik oleh para buzzer, atau menurut Mas Uceng, "parasit demokrasi." Keempat, ada kecenderungan atau upaya untuk mempercepat penyelesaian masalah apapun hanya dengan logika negara. Itu berarti, aspirasi tidak lagi dibutuhkan. Bahkan, mengemuka pula logika otoriter, yang menukil pandemi sebagai alasan untuk membenarkan kepemimpinan otoriter bagi lancarnya penanganan situasi darurat ini. Hal ini misalnya nampak dalam cara pandang pemerintah yang melihat bahwa suatu masalah cenderung membutuhkan tangan keras dan gertakan untuk mengatasi masalah tersebut. Mas Uceng menganalogikannya sebagai berikut: "Selalu kelihatan semua problem itu adalah paku, dan jalan terbaik untuk menyelesaikannya adalah dengan palu."

Setelah 45 menit berdiskusi daring, kami mengakhiri diskusi ngeri-ngeri sedap ini. Mas Uceng pun mengundurkan diri dan meninggalkan ruang pertemuan. Sementara kami tertinggal di ruang itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, kami merasa apa yang terjadi pada KPK saat ini amat mengerikan, dalam artian upaya-upaya itu dilakukan secara sistematis dan tepat sasaran. Bahkan dapat disimpulkan bahwa saat ini, KPK--bagai kerbau yang dicocok hidungnya--telah dijinakkan dan dipaksa melayani majikan yang memperbudaknya: aliansi bisnis-pemerintah. Di sisi lain, kami menaruh harapan karena belum pasti jalan ke depan pemberantasan korupsi Indonesia gelap gulita. Selama obor kontrol rakyat tak pernah padam, selama itu pula gelora anti-korupsi akan tetap hidup dan mencahayai Indonesia.

Sebuah Cakap di Siang Hari

Penulis: Cheryl Kanza Athallia Wibowo
Penyunting: Tia Intan Nurlaeli

Hujan mulai mengguyur bumi, membasahi setiap inci tanah yang kini telah tertutupi lapisan semen. Hujan yang tak diduga-duga ini membuat beberapa orang yang tengah berjalan di depanku langsung memacu langkah mereka, entah berniat menerobos hujan atau mencari tempat berteduh sementara. Salah satu orang yang memilih opsi terakhir adalah aku, Brata Panuntun. Melangkahkan kaki dengan cepat, aku mengamankan tempat duduk di sebuah halte bus tua di sekitar ITC. Mengedarkan pandangan dan menyadari bahwa halte kecil ini makin pengap dengan jumlah manusia yang terus bertambah, tak lupa beberapa orang tua mulai menghisap rokok, mengeluarkan zat beracun itu dan membuatku sedikit merasa sebal.

"Kita kini harus bersiap menghadapi era society 5.0 atau era masyarakat 5.0..."

Ujaran pembawa berita yang berasal dari ponsel bapak-bapak di sebelahku itu menggiring memoriku pada kejadian siang tadi di taman kampus. Obrolan ringan namun serius yang terajut karena sebuah pertanyaan sederhana yang diutarakan oleh Andrea, mengenai apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menunjukan eksistensinya sebagai pembawa perubahan atau "Agent of Change" bagi bangsa dan sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh kami ketika sudah menyelesaikan kuliah.

"Ya gimana ya, menurut gua, kita sebagai agent of change, di era yang udah berubah ini, hal paling penting tuh mengaktualisasi diri supaya tidak ketinggalan dan bisa dapat kerja yang layak." Kala, pemuda yang merupakan sahabat dekatku memulai bincang itu dengan sesuatu yang berat, aku ingat yang kami bicarakan sebelumnya hanya perihal pekerjaan apa yang akan dilakoni saat sudah lulus kuliah. Namun, entah mengapa pembicaraan mulai bergeser ke arah yang lebih serius.

"Gua setuju dengan kata "Agent of Change", tapi gua gak setuju kalau kita mengaktualisasi diri dengan alasan supaya bisa bekerja." Sajingga memberikan sudut pandangnya, menyeruput boba yang tinggal setengah dan tampak kalem menanggapi perkataan Kala, "Kita mengaktualisasi diri tuh bukan buat kerja, tapi memang sudah kewajiban kan?"

Pertanyaan itu tidak terlalu jelas kepada siapa dilontarkan, namun Andrea mengangguk, menyetujui ujaran Kala.

"Iya, gua setuju sih, aktualisasi diri itu alasannya bukan buat kerja aja, tapi memang itu kewajiban kita. Kita harus bisa beradaptasi dengan zaman yang terus maju, udah di era industri 4.0 bahkan di society 5.0, sebagai mahasiswa, kalau kita diam dan tidak beradaptasi ya kolaps lah bangsa ini." Andrea memberikan pandangannya.

Aku setuju dengan semua opini teman-temanku, tapi bentuk aktualisasi apa yang konkret itu?

"Pengaktualisasian itu kayak gimana sih? Kayaknya kata "aktualisasi" itu masih terlalu abstrak deh." Aku melemparkan sebuah tanya, mengambil makanan entah milik siapa yang tergeletak di tengah-tengah kami.

"Aktualisasi tuh ya, pencapaian tertinggi seseorang dalam memenuhi kebutuhannya." Andrea menjawab, semua orang langsung menatap tertarik dengan perkataan Andrea, "Ya, maksud gua tuh, pengaktualisasian berarti punya maknamelakukan sesuatu secara maksimal, misalnya dalam megembangkan potensinya untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya ya banyak macemnya, bisa kebutuhan primer, sekunder, atau bahkan tersier."

"Oh, iya-iya gua ngerti, kalau dalam konteks pembahasan kita tuh, kita mengaktualisasikan diri artinya kita bukan cuman beradaptasi untuk bertahan tapi juga mengembangkan kemampuan yang kita miliki, misalnya lebih belajar lagi mengenai digitalisasi, penggunaan Ms. Word, Excell, yang gitu-gitu kan?" Kala menimpali, memberikan senyuman bangga saat mengerti apa yang dikatakan oleh Andrea.

Andrea mengangguk, memberikan jempolnya pada Kala.

"Terus gimana cara kita buat mengaktualisasikan diri?" Lagi aku melontarkan sebuah tanya karena pertanyaan yang tadi menurutku belum terjawab. Itu baru arti dari aktualisasi, belum pengaplikasian aktualisasi dan bagaimana cara untuk mencapainya.

"Maksud Brata tuh gini loh kawan-kawan, aktualisasi balik lagi ke tadi masih bentuk sesuatu yang absurd, yang kita butuh tuh, caranya gimana hehe, yang konkret gitu."

Nah, Sajingga memang paling mengerti maksudku, aku memang tidak terlalu pintar berbicara berbeda dengan teman-temanku yang lain. Sajingga bisa dibilang adalah interpreter pribadiku. Ia selalu menguraikan kalimatku menjadi lebih "manusiawi".

Andrea meminum freshtea-nya sebelum menjawab yakin, "Literasi, menurut gua sih, literasi tuh salah satu cara untuk aktualisasi diri dan bisa menjadi bekal kita, mahasiswa."

"Literasi? Kenapa literasi?" Kali ini yang bertanya Sajingga, ia menatap Andrea yang duduk di sampingnya dengan penasaran.

"Soalnya," Andre menyamping balas menatap Sajingga, "Literasi tuh sekarang bukan lagi melulu soal baca tulis, meski memang basicnya ya baca tulis, tapi lebih mengarah kepada keterampilan dalam menganalisis dan memahami banyak bidang, misalnya literasi finansial, literasi audio-visual, literasi digital, dan literasi informasi. Nah literasi itu sudah mencakup banyak hal yang mengarah kepada keterampilan, Soooooo, itu bakal jadi bekal yang baik."

"Ngomong-ngomong bekal, gua jadi lapar deh," Kala tiba-tiba keluar dari topik membuat Sajingga dan Andrea langsung menoyor kepalanya.

"Tapi gua setuju sih, literasi memang sepenting itu, cuman kadang, eh nggak kadang sih, seringnya, kita sebagai mahasiswa sering lupa masalah literasi ini. Kita nganggapnya enteng aja gitu mengenai literasi, baik literasi digital, literasi informasi dan lain-lain. Nganggapnya kalau kita bisa main hp berarti kita udah paham mengenai literasi digital dan literasi

informasi, padahal nyatanya, masih banyak mahasiswa yang gagap informasi, mudah termakan beritu bohong, hoax." Andrea dan Kala mengangguk-angguk mendengar ocehan Sajingga.

Ya, sering kali kita meremehkan literasi karena menganggapnya sesuatu yang tidak penting, padahal jika melihat dari data yang ada, negara-negara maju yang keren itu adalah mereka yang menyandang peringkat atas dalam bidang literasi, misalnya Jepang dan Korea. Bahkan di Jepang, orang-orang selalu membawa buku kecil untuk dibaca, mereka juga sudah diajarkan mengenai literasi sejak dini, bukan hanya literasi baca dan tulis, tetapi juga literasi informasi, literasi finansial dan lain-lain, mereka diajarkan dari hal yang sederhana sehingga hal tersebut melekat hingga anak-anak itu bertumbuh dewasa.

"Yep, yep, yep, setuju banget. Bahkan gua aja kadang ngerasa gak bisa bedain mana berita hoax, mana berita yang beneran. Sesaru itu sih, apalagi kalau udah viral, beuh dampaknya itu loh." Sajingga berkomentar, ia mengekspresikan setiap ucapannya dalam tindakan. Bahunya bergidik ngeri.

Kala ikut mengangguk mengiyakan perkataan Sajingga, "Yes, literasi finansial juga, gua yang usianya 20 tahun ini masih kesulitan banget buat nabung atau ngatur keuangan gua. Kadang duit menghilang aja gitu hehe."

"Itumah bukan hilang, lu aja yang hedon Kalamana Anjasmara!" Andrea menoyor kepala Kala keras, biasa jika sudah dekat kadang sopan-santun dilupakan begitu saja.

"Tapi ya, bener loh, gua juga sama kayak Kala. Bulan lalu, kalian tahukan, gua dapat duit lumayan banyak dari freelance, tapi duitnya gak jelas kemana perginya. Nah, hal ini makin buat gua sadar kalau literasi finansial itu penting banget." Sajingga lagi-lagi mengomentari, setuju dengan pernyataan Kala.

Aku juga ikut mengangguk, pantas memang pemerintah terus menggalakkan mengenai gerakan literasi di sekolah-sekolah, meski masih di ranah literasi baca tulis, literasi digital dan literasi informasi, tetapi hal itu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

"Bener sih, pengetahuan mengenai literasi ini nantinya bisa membantu kita untuk beradaptasi dan berbaur dengan kehidupan, yang mungkin nih, nanti kalau beneran udah di era society 5.0, teknologi digital akan lebih canggih dari sekarang."

Aku ikut menimpali dan ketiga temanku yang lain mengangguk setuju dengan hal tersebut.

"Hah, hal yang ternyata kita anggap remeh itu ternyata adalah hal yang sangat penting banget-banget-banget ya, terutama buat kita yang mahasiswa ini."

Ujaran Kala saat itu menjadi penutup perbincangan kami mengenai cara mahasiswa seperti kami menghadapi era society 5.0. Tanpa sadar, kami mendapatkan hal baru dari diskusi itu, membuka pemikiran kami mengenai betapa pentingnya literasi.

Setidaknya buatku, kini aku melihat bagaimana literasi merupakan sebuah fondasi dan juga senjata agar kami dapat beradaptasi dengan lingkunga dan era yang mungkin akan berubah. Tidak hanya bergeser, namun manusia, lingkungan atau kehidupan sosial akan mengalami disrupsi, bisa secara keseluruhan maupun sebagian dan tentu berefek pada segala jenis tatanan sosial masyarakat.

Sehingga literasi adalah bekal yang paling komplit untuk mahasiswa menghadapi tantangan perubahan itu.

Tak terasa hujan sudah mulai mereda, wangi petrikor sudah menghilang, beberapa orang meninggalkan halte menuju tempat yang mereka tuju. Akupun ikut berdiri, mulai melihat langit dengan perasaan yang entah mengapa mendadak lega. Aku merasa sangat beruntung karena dapat mengenyam pendidikan hingga setinggi ini, sesuatu yang dulu tidak pernah bisa aku bayangkan. Karena dulu, aku hanyalah seorang anak yang bermimpi untuk bisa mengubah Indonesia sesuai dengan nama yang Ibu berikan.

Ibu pernah bilang bahwa Brata Panuntun punya makna yang dalam, ada doa yang mengiringi nama itu. Brata berarti anak lelaki, sedang Panuntun artinya yang menuntun jalan, jadi Brata Panuntun memiliki makna anak lelaki yang menuntun jalan pada keadilan. Dan nama itu seakan menjadi jiwanya, sedari dulu aku memang selalu seperti itu. Senang menjadi pemimpin, senang menuntun teman-teman ku untuk melakukan sesuatu yang positif serta bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

Dulu, aku hampir tidak memiliki kesempatan untuk bisa berkuliah, namun aku terus berusaha meski Ibu sempat bilang, sulit bagi orang seperti kami untuk bisa berkuliah di kota besar. Biayanya tidak memungkinkan, apalagi Ibu hanyalah janda tua yang kesehariannya bercocok tanam di ladang warisan orang tua. Namun tekadku kuat, sejak menginjak kelas XI SMA, aku jadi rajin belajar, mengikuti perlombaan demi perlombaan, mencoba mengatur jadwal belajar, membantu Ibu, dan mengurangi bermain. Saat siswa lain sudah terlelap, aku dengan lampu belajar kecil masih berkutat dengan buku kiat SBMPTN hasil pinjaman dari tetangga.

Hasilnya? Aku bisa masuk PTN favorit dengan nilai memuaskan, aku sangat bersyukur karena bisa bertemu dengan teman-temanku yang lain, membuka pemikiranku menjadi lebih terbuka dan menyadari bahwa bekal paling penting dan tanggung jawab paling penting untuk mahasiswa adalah literasi. Sesuatu yang tampak sederhana namun ternyata sangat berharga dan bisa menjadi pegangan untuk menghadapi perubahan dalam berbagai tatanan sosial di era revolusi industri ini, menghadapi era society 5.0.

Langkahku menuju kosan kini menjadi mantap ada motivasi yang mulai menyelusup ke dalam manah, untuk menjadi mahasiswa, manusia yang bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan disrupsi yang terjadi secara cepat.


REDUCE
REDUCE
REDUCE